

No. 184 Juni 2021

BaKTI News

www.baktinews.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



LABIRIN PERKAWINAN ANAK

**PROSPEK OTSUS UNTUK
PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN ORANG ASLI
PAPUA**

**SALASSAE, KAMPUS KEHIDUPAN
MAHASISWA PERTANIAN**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews****

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews****

Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTI**News**

Juni 2021

No. 184

- 1** Labirin Perkawinan Anak
Oleh **LUSIA PALULUNGAN**
- 5** Menakar Kebutuhan Investasi
Oleh **A.M. SALLATU**
- 8** PROSPPEK Otsus Untuk
Pembangunan dan Kesejahteraan
Orang Asli Papua
Oleh **HALIA ASRIYANI**
- 13** Bekerja Sama Dengan Pemerintah
Daerah untuk Meningkatkan
Penyediaan Layanan Dasar
Oleh **KARRIE MCLAUGHLIN**
- 17** Salassae, Kampus Kehidupan
Mahasiswa Pertanian
Oleh **ISWAN AFANDI**
- 21** Badai Siklon NTT, dan Sebuah Upaya
Respons Inklusif dari Organisasi
Difabel
Oleh **NUR SYARIF RAMADHAN**
- 25** Menjaga Tradisi Tanam Padi Lokal
Orang Tobaru
Oleh **MAHMUD ICHI**
- 31** Gender *Pay Gap* dan Kebebasan
Memilih
Oleh **SAMUELLA CHRISTY**
- 34** Memupuk Asa di Tengah Pandemi
Oleh **ANDI ARIFAYANI**
- 37** Rencana pembangunan landasan roket
SpaceX milik Elon Musk di Biak, Papua
Ancam Lahan dan Penghidupan
Masyarakat Lokal
Oleh **SOPHIE CHAO**
- 40** Diskusi *Online Live* di
Instagram Story @infobakti
- 41** Terbaru di Batukarinfo
- Foto Cover :
Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI



LABIRIN PERKAWINAN ANAK

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia,
karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia”

Mahatma Gandhi



Oleh **LUSIA PALULUNGAN**

Pencegahan perkawinan anak merupakan bentuk perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap hak anak untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,5%. Namun, penurunan ini masih tergolong lambat dan diperlukan upaya yang sistemik dan terpadu untuk mencapai target 8,74% pada 2024 dan 6,94% pada 2030.

Pencanangan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yang diluncurkan pada Februari 2020 menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk bekerja bersama dalam menyelesaikan isu kompleks perkawinan anak.

Kebijakan dan strategi pembangunan, telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Di dalam RPJMN 2020-2024, perkawinan anak menjadi salah satu indikator di dalam Prioritas Nasional tiga (3) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, pada Program Prioritas peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Angka perkawinan anak ditargetkan turun dari 11,2% di 2018 menjadi 8,74% di 2024. Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), angka perkawinan anak diproyeksikan terus menurun sampai 6,94% di akhir 2030.



Foto: Idris Djunaed/Nayasan BaKTI



TAHUN ANGGARAN PENDIDIKAN (TRILIUN)

Rp.505,8	2021
Rp.492,5	2020
Rp.549,5	2019
Rp.444,1	2018
Rp.419,8	2017
Rp.370,4	2016

Data: Seknas FITRA

Foto: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

Perkawinan anak merupakan persoalan multidimensi. Kemiskinan, kondisi geografi, kurangnya akses terhadap pendidikan dan putus sekolah, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotip gender tertentu (misalnya perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (intepretasi agama dan tradisi lokal) adalah faktor yang ditengarai berkontribusi terhadap masih tingginya prevalensi perkawinan anak di Indonesia. Hal ini termuat dalam Laporan Pencegahan Perkawinan Anak yang disusun Badan Pusat Statistik bersama dengan UNICEF dan PUSKAPA UI memperbarui data terkait perkawinan anak dan faktor-faktor sosial ekonomi yang memengaruhinya seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pekerjaan.

Menurut SUSENAS 2017, di antara perempuan 20-24 tahun yang sudah menikah, alasan utama mengapa mereka tidak bersekolah lagi adalah menikah (47,9% untuk yang menikah di bawah 18 tahun dan 42,1% untuk menikah di atas 18 tahun). Alasan terbesar selanjutnya adalah

mengurus rumah tangga dan tidak ada biaya sekolah. Sedangkan di antara perempuan 20-24 tahun yang belum menikah, terdapat 34,94% mengaku masih bersekolah dan jika tidak bersekolah lagi, alasan terbesarnya adalah karena bekerja (30,54%), dilanjutkan dengan tidak ada biaya sekolah dan merasa pendidikannya sudah cukup. Untuk laki-laki yang berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun, alasan utama berhenti sekolah adalah menikah (41,78%). Selanjutnya dengan alasan terbesar kedua yakni bekerja (28,90%). Sementara itu, untuk yang menikah setelah 18 tahun alasan bekerja atau mencari nafkah adalah yang paling banyak disebutkan (34,83%) dan alasan menikah adalah alasan terbesar yang kedua.

Situasi terkini mengenai wajah pendidikan di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat terdapat 157 ribu siswa SD hingga SMA putus sekolah pada tahun ajaran 2019/2020. Siswa yang putus sekolah paling banyak berada di jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 59,4 ribu siswa. Padahal di beberapa tahun sebelumnya, jumlah anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar berkurang signifikan, dari

60.066 di 2015/2016 menjadi 32.127 pada 2017/2018. Selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 38,5 ribu siswa.

Di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) ada 26,9 ribu siswa dan 32,4 ribu siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berhenti sekolah. Jika kita mencermati jumlah siswa yang putus sekolah pada tingkat SMA/SMK maka jumlahnya mencapai 59,3 ribu siswa. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi kedua dari angka putus sekolah jenjang SD.

Meskipun data yang tersedia tidak berkorelasi langsung antara angka putus sekolah dengan perkawinan anak, namun mencermati angka putus sekolah tahun ajaran 2019/2020 yang makin meningkat khususnya dua tahun terakhir maka keterhubungan dari putus sekolah menjadi penyebab perkawinan dan sebaliknya perkawinan menjadi penyebab putus sekolah, sejalan dengan berbagai penelitian dan temuan lapangan oleh DPPPA kabupaten/kota ketika melakukan pendampingan bagi anak yang terlibat dalam perkawinan dalam proses persidangan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Menurut UNICEF, pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab siswa putus sekolah. Organisasi tersebut memperkirakan terdapat sekitar 1% siswa yang berhenti sekolah akibat pandemi. Penyebab mendasarnya akibat pandemi pemutusan hubungan kerja dan kehilangan sumber penghasilan orang tua yang berujung pada kemiskinan.

Pada sisi yang lain, berdasarkan data yang publikasikan Seknas FITRA yang dirangkum dari APBN 2015-2020, menunjukkan peningkatan anggaran pendidikan yang signifikan setiap tahunnya (lihat tabel).

Anggaran pendidikan tahun 2021 sebesar 549,5 triliun rupiah atau 20% dari APBN akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Tersajinya data angka putus sekolah yang paling tinggi pada dua tahun terakhir selain dapat berkorelasi pada meningkatnya perkawinan anak. Juga sangat berpengaruh pada tingkat

kemiskinan yang peluang kerja lebih dominan ke sektor informal. Juga akan memengaruhi angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai salah satu indikator pencapaian pembangunan nasional.

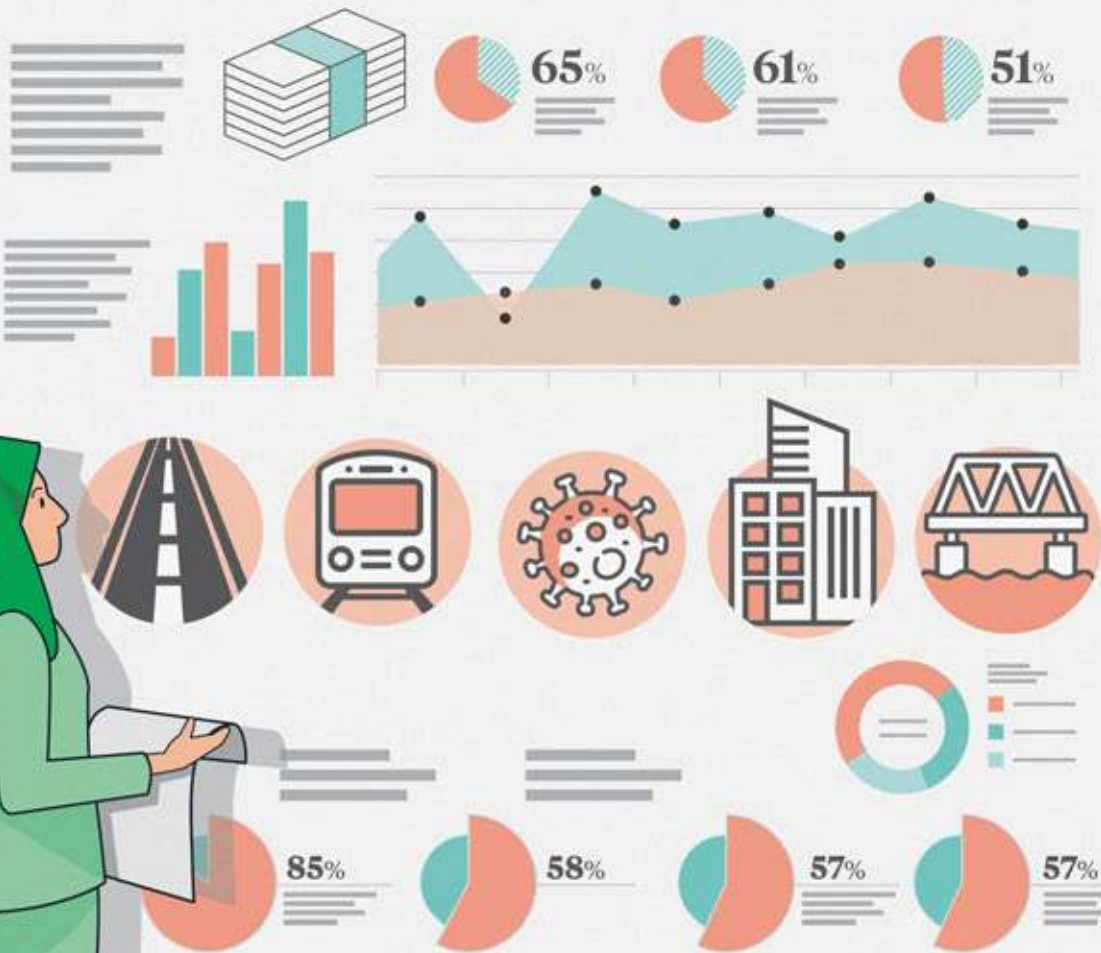
Sehingga peningkatan anggaran pendidikan khususnya tahun 2021, diharapkan dapat mengatasi penyebab siswa putus sekolah akibat pandemi melalui berbagai program agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif, salah satunya adalah Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan.

Sebagaimana diatur dalam Permendikbud 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, dana PIP digunakan oleh peserta didik untuk memenuhi segala kebutuhan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku hingga untuk uji kompetensi. Tujuan dari PIP untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu agar dapat menyelesaikan pendidikannya, baik melalui jalur formal seperti SD hingga SMA/SMK, maupun jalur non formal yaitu Paket A, Paket C dan pendidikan khusus. Melalui program PIP tersebut, pemerintah berupaya mencegah peserta didik putus sekolah. Juga berharap dapat membuat peserta didik yang putus sekolah untuk dapat melanjutkan kembali pendidikannya.

Intervensi melalui sektor pendidikan ini diharapkan dapat menjadi jalan untuk keluar dari labirin kerumitan dan berbelit-belitnya faktor-faktor penyebab perkawinan anak seperti kemiskinan, pemahaman orang tua karena faktor pendidikan (ketika kelak mereka menikah), serta berbagai faktor yang ditengarai berkontribusi terhadap masih tingginya prevalensi perkawinan anak di Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi melalui email: lpalulungan@gmail.com



Menakar Kebutuhan Investasi

Oleh **A.M. Sallatu**

S

ejauh ini masih tetap ada ketidakjelasan, mulai dari skala nasional maupun dan utamanya pada skala wilayah, seputar pergerakan kebutuhan investasi. Apakah investasi diinginkan menggerakkan perekonomian, atau, pergerakan ekonomi yang sebenarnya butuh dorongan investasi? Tentu saja kecenderungan dan realitas pergerakan ekonomi yang terlebih dahulu patut



Ilustrasi: Ihsan Djunaed/Yayasan BAKTI

diperjelas, dan bagaimana pemetaannya. Terlebih lagi selama masa pandemi COVID-19 dan kecenderungan perkembangan setelahnya.

Sejumlah analisis memperlihatkan bahwa kurun waktu 2014-2019, pergerakan roda perekonomian baik nasional maupun wilayah,

tidaklah terlalu menggembirakan. Banyak hambatan dan kendala yang menyelimuti baik penciptaan margin usaha maupun penciptaan nilai tambah ekonomi. Kondisinya menjadi semakin terkoreksi dengan kehadiran pandemi COVID-19, sehingga memasuki tahun 2021 dan mungkin saja setelahnya, mencapai kembali kinerja perekonomian yang setara dengan tahun 2019 masih tetap akan sulit. Apalagi masih menjadi diskusi kebijakan yang hangat tentang *trade-off* antara mengedepankan kebijakan ekonomi dan atau mendahulukan kebijakan bidang kesehatan untuk penanganan pandemi COVID-19. Kesimpulan sederhananya adalah keduanya ditangani secara berbarengan, yang juga bukan pilihan yang sederhana dalam implementasinya.

Penciptaan margin usaha dan penciptaan nilai tambah ekonomi, pada tahun 2020, nyaris berkontraksi semuanya. Tercatat bahwa menjelang akhir tahun 2020, mulai terjadi pergerakan ekonomi, namun tidak tersedia peta apalagi data yang jelas pada sektor dan kegiatan ekonomi apa saja yang mulai mencipta margin usaha dan nilai tambah ekonomi. Yang pasti, sektor dan kegiatan yang berskala ekonomi menengah ke atas, masih memerlukan dukungan kebijakan untuk menahan tingkat keparahan kontraksi yang terjadi. Oleh karena itu, sangat logis dihipotesiskan bahwa margin usaha dan nilai tambah ekonomi yang tercipta lebih didominasi oleh kegiatan ekonomi pada rumah tangga produktif. Persoalannya, sangat tidak bisa didukung oleh data yang konkrit. Margin usaha dan nilai tambah ekonomi yang tercipta pada masing-masing rumah tangga produktif ini terbilang cukup kecil, tetapi secara kumulatif dalam perekonomian tentu cukup signifikan, termasuk di tingkat wilayah atau daerah.

Dengan demikian perspektif kebutuhan investasi membutuhkan pencermatan dari

Sulit untuk menyangkal bahwa sejauh ini investasi tidak berperan efektif mendorong pertumbuhan, bahkan lebih menonjol dampak negatif yang ditimbulkannya.

kalangan penentu kebijakan ekonomi. Pilihan kebijakannya menjadi tidak mudah. Analisis pembiayaan untuk sektor dan kegiatan ekonomi skala ekonomi menengah ke atas, perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal tersebut tercermin secara baik dari motif berinvestasi dari calon investor maupun pengelola sektor keuangan. Demikian pula di sisi lain, mendorong skema pembiayaan pada rumah tangga ekonomi produktif bahkan lebih kompleks lagi. Fenomena yang ada ini menimbulkan tanda tanya, apakah dewasa ini dan dalam kurun waktu yang dekat ke depan, apakah skema investasi sudah mendesak? Setidaknya, walaupun investasi ingin didorong untuk menggerakkan kegiatan perekonomian, para investor dan pengelola sektor keuangan akan benar-benar sangat berhati-hati. Artinya, proses pengambilan keputusannya akan memakan waktu, sambil memperhatikan pergerakan ekonomi yang secara ril terjadi.

Justru pada kondisi seperti sekarang ini, mungkin sepatutnya untuk lebih arif menelaah secara mendasar kepentingan dan kebutuhan investasi. Apalagi sulit untuk menyangkal bahwa sejauh ini investasi tidak berperan efektif mendorong pertumbuhan, bahkan lebih menonjol dampak negatif yang ditimbulkannya. Suka atau tidak suka, ketimpangan yang terjadi dalam realitas kehidupan adalah juga kontribusi investasi yang dilakukan selama ini. Belum lagi kerusakan lingkungan hidup yang menyertainya. Investasi juga secara nyata belum bisa berperan optimal dalam memperluas kesempatan kerja, tingkat pengangguran masih tetap tinggi. Pada

intinya, wawasan dan cara pandang investasi perlu dicermati kembali. Dalam substansi yang seperti apa investasi di tanah air ingin didorong saat ini dan ke depan.

Menyoroti data Sulsel misalnya, pertumbuhan kredit dalam satu dekade terakhir (2010-2020) memang meningkat terus nilainya, tapi dalam kurun waktu yang sama pertumbuhan kredit menurun terus. Itu berarti, pergerakan ekonomi di wilayah ini, belum banyak dilirik oleh skema pembiayaan perbankan atau memang kegiatan ekonomi selama ini senantiasa terbatas untuk bisa dilirik oleh sektor keuangan. Hal ini terkonfirmasi oleh data lainnya, bahwa nilai kredit yang meningkat di Sulsel adalah karena terjadinya arus masuk uang ke wilayah ini, terlihat dari data LDR (*loan to deposit ratio*) yang selalu bertengger di atas 100%. Gambaran ini sekaligus juga menggambarkan bahwa mungkin pelaku ekonomi di wilayah ini masih kurang dalam *bank minded*-nya.

Jenis kredit terbesar selama satu dekade terakhir lebih dominan pada kredit konsumsi, baru disusul oleh kredit modal kerja. Sektor ekonomi yang selama ini mendominasi pemanfaatan skema kredit adalah sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, masih dibawah 10% itupun fluktuatif. Gambaran ini memperlihatkan bahwa substansi investasi di wilayah ini, masih belum efektif bisa mendorong perekonomian wilayah. Padahal Sulsel sudah tergolong sebagai wilayah yang cukup dinamis dalam gerak perekonomiannya.

Masih harus ditunggu substansi kepentingan pembentukan kementerian investasi. Apakah akan terlahir wawasan dan cara pandang yang baru dalam kaitan investasi di tanah air ke depan, yang benar-benar mampu menggerakkan perekonomian sampai ke tingkat wilayah dan daerah. Disamping sudah benar-benar mempertimbangkan potensi dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh setiap kegiatan investasi. Atau lebih banyak akan memuat bobot politik belaka. Semoga saja tidak demikian!

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Koordinator Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JKTI) dan dapat dihubungi melalui email madjid76@gmail.com

PROSPPEK OTSUS UNTUK PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA

Oleh **HALIA ASRIYANI**

Sebagai salah satu daerah dengan otonomi khusus, Papua memiliki kewenangan khusus yang diakui untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi ini diberikan oleh negara melalui Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2001 yang berisikan hal mendasar berupa pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Selain itu juga terdapat pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.





Selanjutnya, PERPPU Nomor 1 Tahun 2008 yang diterbitkan pada 16 April 2008 yang menegaskan bahwa otonomi khusus ini tidak hanya berlaku di Provinsi Papua, melainkan juga Provinsi Papua Barat. Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua Barat adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua Barat. Pemberian kewenangan tersebut disertai dengan pemberian dana otonomi khusus yang antara lain dimaksudkan untuk percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan Orang Asli Papua (OAP).

Selama hampir 20 tahun implementasi Otsus di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat), pemerintah kedua provinsi terus berupaya merancang dan melaksanakan program-program inovatif dan kontekstual Papua untuk akselerasi pembangunan di kedua provinsi. Kementerian Keuangan RI mencatat jumlah dana Otsus yang telah disalurkan untuk Papua dan Papua Barat selama 20 tahun terakhir mencapai 138,65 triliun rupiah. Dengan dana tersebut, sejumlah program pernah dirancang secara khusus untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat seperti jaminan kesehatan masyarakat Papua (Kartu Papua Sehat dan kerja sama BPJS Papua Barat untuk *universal coverage*); meningkatkan kualitas pendidikan (beasiswa bagi siswa sekolah dasar, menengah dan kejuruan, beasiswa pendidikan tinggi); pemberdayaan ekonomi (PROSPEK Papua, insentif usaha bagi pengusaha asli Papua); dan peningkatan pembangunan kampung (RESPEK dan Gerbangmas).

Alokasi Dana Otsus untuk Kesejahteraan OAP

Di tahun 2020, tepatnya pada tanggal 25 November 2020, sebagai bagian dari implementasi Otsus di Papua Barat, diluncurkan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung-Otonomi Khusus (PROSPPEK-OTSUS). Diresmikan oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, PROSPPEK-OTSUS merupakan inisiatif bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat, bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kampung, kelurahan dan distrik dalam bidang ekonomi maupun pelayanan dasar, khususnya bagi OAP. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Barat Nomor 2 Tahun 2019 yang



menetapkan bahwa sebagian dana Otsus Papua Barat dialokasikan untuk PROSPPEK-OTSUS. Di tahun anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyalurkan bantuan sebesar Rp250 juta per kampung di 1.742 kampung, Rp150 juta/kelurahan di 95 kelurahan dan Rp100 juta/distrik di 218 distrik. Pada tahun anggaran 2021, pemerintah juga telah berkomitmen untuk menyalurkan bantuan keuangan dengan jumlah yang sama.

PROSPPEK-OTSUS adalah salah contoh inisiatif program yang selaras dan mendukung kebijakan dan program nasional dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat pembangunan kampung di seluruh Provinsi Papua Barat. Program ini sendiri terdiri dari empat komponen yaitu (1) penguatan Sistem Informasi dan Administrasi Kampung (SAIK); (2) peningkatan kapasitas kader dan aparatur pemerintah kampung; (3) penguatan distrik dalam melaksanakan BINWAS terhadap kampung; serta (4) penguatan sinergi bidang pembangunan di kampung. Melalui keempat komponen program ini, diharapkan kampung dapat mengelola dan menggunakan anggaran ke kampung menjadi lebih efektif dan berhasil guna sesuai dengan tujuan nasional dan kebutuhan kampung.

Dukungan KOMPAK-LANDASAN pada Program PROSPPEK-OTSUS

Program KOMPAK-LANDASAN sejak tahun 2017 telah bekerja di berbagai wilayah di Papua dan Papua Barat. Untuk Papua Barat sendiri, sejumlah empat kabupaten menjadi wilayah dampingan program di antaranya Kabupaten Manokwari Selatan, Kaimana, Fakfak dan Sorong. Selama itu, KOMPAK-LANDASAN bermitra dan bekerja sama dengan pemerintah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga distrik dan kampung. Program sinergi perencanaan dan SAIK+ merupakan dua program utama yang dijalankan KOMPAK-LANDASAN di wilayah program.

Sinergi perencanaan merupakan upaya membangun sinergi antara kampung dan layanan dasar masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan dalam menyusun perencanaan. Diharapkan, dengan bersinergi permasalahan yang dihadapi kampung dan unit layanan dapat diatasi bersama-sama dengan lebih cepat dan tepat dibanding dikerjakan sendiri. Sementara itu, untuk membuat perencanaan yang menjawab permasalahan yang dihadapi dengan tepat maka dibutuhkan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi suatu wilayah secara menyeluruh. Program SAIK+ kemudian menjadi



upaya untuk menghadirkan informasi yang lengkap dan menyeluruh terkait data kependudukan, sosial dan ekonomi setiap penduduk dalam satu kampung. Sejak 2017 pun, KOMPAK-LANDASAN telah menguji coba perencanaan kampung berbasis data di empat kabupaten dampingan di Provinsi Papua Barat.

Kedua program KOMPAK-LANDASAN yaitu Sinergi Perencanaan dan SAIK+ ini pun secara resmi telah diintegrasikan ke dalam PROSPPEK-OTSUS. Dengan kata lain, Pemerintah Provinsi Papua Barat mereplikasi program Sinergi Perencanaan dan SAIK+ ke seluruh wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 13 kabupaten/kota, 218 distrik, 106 kelurahan dan 1.742 kampung. Penguatan sinergi bidang pembangunan kampung pada program PROSPPEK OTSUS ini dilakukan untuk meningkatkan kerja sama antara kampung/kelurahan dan unit layanan dalam peningkatan akses dan kualitas layanan masyarakat. Sedangkan Penguatan SAIK dimaksudkan untuk menunjang tujuan utama dari program ini yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di kampung dan distrik dalam bidang ekonomi dan pelayanan dasar yang dikhususkan bagi OAP. Keberadaan fitur yang memuat data terpilah OAP

pada SAIK+ memang akan sangat menunjang tujuan dari program PROSPPEK-OTSUS untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, khususnya OAP.

Melalui pelatihan kader SAIK+, KOMPAK-LANDASAN menyiapkan para kader kampung yang akan mengawal proses penyiapan pangkalan data SAIK+ di kampung mereka masing-masing. Sejumlah delapan distrik dari empat kabupaten yang menjadi wilayah kerja KOMPAK-LANDASAN akan mengikuti pelatihan kader ini. Namun atas kerja sama dengan program PROSPPEK-OTSUS, maka selain delapan distrik yang menjadi wilayah dampingan program, distrik-distrik lain yang berada di luar wilayah kerja program turut pula mengikuti kegiatan pelatihan kader ini. Kegiatan ini telah berjalan di dua kabupaten yaitu Kabupaten Fakfak yang diikuti oleh 216 kader dari 146 kampung di 17 distrik dan di Kabupaten Kaimana yang diikuti oleh 166 kader yang berasal dari 84 kampung di 7 distrik. Pelatihan yang sama juga akan dilakukan di dua kabupaten dampingan lainnya yaitu Kabupaten Sorong dan Manokwari Selatan yang akan diikuti oleh kader-kader dari seluruh kampung di kabupaten tersebut.

Sejak mulai penyusunan konsep dan peraturan mengenai PROSPPEK-OTSUS,



KOMPAK-LANDASAN telah terlibat dan memfasilitasi sejumlah pertemuan membahas rancangan program ini. Langkah awal pelaksanaan program ini dimulai dengan *Training of Trainer* (ToT) Penguatan SAIK+, Penguatan Pendampingan Distrik dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Kampung. Kegiatan ini berlangsung pada 3-5 Desember 2020 dengan difasilitasi oleh tim KOMPAK-LANDASAN. Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Infokom dan Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat ini bertujuan program ini untuk menambah kapasitas pelatih di tingkat provinsi yang akan menularkan pengetahuannya mengenai SAIK+, pendampingan distrik dan sinergi perencanaan di tingkat kabupaten nantinya.

Saat ini, kurang lebih lima bulan setelah peluncuran program PROSPPEK-OTSUS, dilakukan Rapat Koordinasi dan *Training of Trainer* PROSPPEK-OTSUS yang berlangsung pada 27-30 April 2020. Kegiatan ini difasilitasi oleh KOMPAK-LANDASAN yang turut pula menjadi narasumber dalam ToT yang dilakukan bersama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat. Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Manokwari ini diikuti oleh perwakilan OPD dari seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat yang

terdiri dari Bappeda, DPMK, Dinas Infokom, Dinas Dukcapil, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan P3MD kabupaten. Rapat koordinasi ini pun menghasilkan komitmen dari semua perwakilan kabupaten mengenai teknis pelaksanaan program mulai dari mekanisme penyaluran dana PROSPPEK-OTSUS, pembentukan tim koordinasi atau penanggung jawab masing-masing kabupaten hingga mekanisme pelaporan dan koordinasi.

ToT PROSPPEK-OTSUS sendiri dilakukan untuk menyiapkan tim pelatih atas tiga komponen PROSPPEK-OTSUS di masing-masing kabupaten. Ketiga komponen tersebut adalah penguatan SAIK; penguatan distrik dalam melaksanakan BINWAS terhadap Kampung; serta penguatan sinergi bidang pembangunan di kampung. ToT ini difasilitasi oleh tim pelatih di tingkat Provinsi Papua Barat bersama tim KOMPAK dan LANDASAN. Para peserta memperoleh penambahan kapasitas mengenai teknis pelaksanaan SAIK+ dan sinergi perencanaan serta penguatan distrik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Para peserta pun siap untuk menjalankan dan membagikan pengetahuannya di kabupaten masing-masing untuk menyukseskan jalannya program PROSPPEK-OTSUS di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat.

Otonomi khusus sebagai sebuah kewenangan yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri menjadi sebuah peluang bagi tanah Papua untuk menciptakan pembangunan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Otonomi khusus akan menjadi sebuah keistimewaan jika pemerintah dapat mengatur dan mengelolanya dengan baik dan tepat. Untuk itu, program PROSPPEK-OTSUS diharapkan menjadi salah satu program yang menjawab tujuan otonomi khusus ini diberikan sebagai sebuah kebijakan bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Tanah Papua.

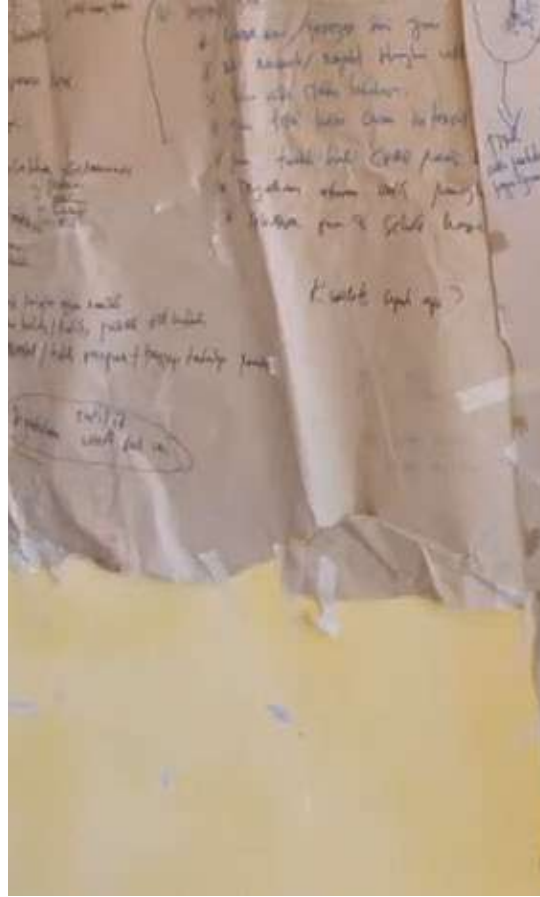
INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program PROSPPEK, dapat menghubungi info@bakti.or.id

Oleh **KARRIE MCLAUGHLIN**

Ketika Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi sekitar 20 tahun silam, didasarkan pada harapan bahwa mendekatkan layanan kepada masyarakat dapat membuat layanan menjadi lebih baik. Namun, ketika tanggung jawab untuk penyediaan layanan dasar beralih dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, jenis tantangan dalam penyediaan layanan itu sendiri juga mengalami perubahan: dari meningkatkan ketersediaan layanan menjadi meningkatkan akses dan kualitas layanan tersebut. Tugas-tugas yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti membangun gedung sekolah dan klinik, serta merekrut guru dan tenaga kesehatan sebagian besar telah selesai dilakukan.

Saat ini, daerah-daerah dihadapkan pada masalah yang lebih kompleks untuk diatasi. Tulisan ini akan membahas Program MELAYANI-Menguraikan Permasalahan Perbaikan Layanan Dasar di Indonesia –



BEKERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR

untuk memahami dengan lebih baik permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang dihadapkan pada tantangan layanan publik yang semakin rumit dan kompleks, dan bagaimana agar daerah mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

MELAYANI mencoba mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk memecahkan masalah tertentu yang mereka pilih terkait penyediaan layanan dasar, pada saat yang sama

menguji pendekatan pengembangan kapasitas yang dapat ditingkatkan, serta mempelajari perubahan yang dimotori oleh daerah.

MELAYANI memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten untuk memilih masalah/isu yang dianggap prioritas, dan membantu memastikan masalah yang dipilih relevan dengan konteks lokal. Dengan menjadikan isu prioritas sebagai basis analisa, ketimbang fokus pada sektor tertentu, hal

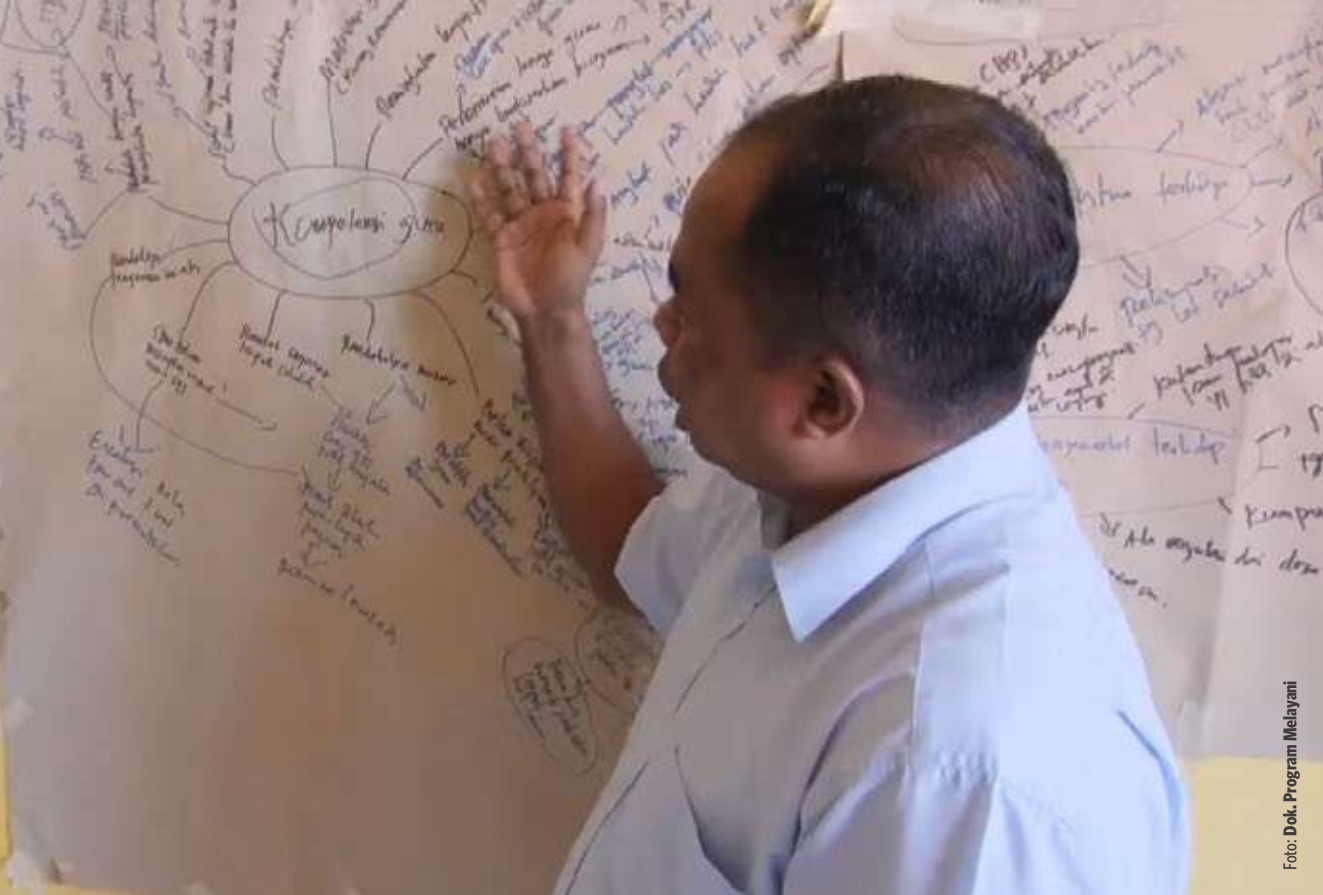


Foto: Dok. Program MELAYANI

tersebut memungkinkan lebih banyak pihak untuk terlibat, dan untuk mengidentifikasi dan memobilisasi sumber daya baru. Selain itu, dengan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk lebih memahami masalah warganya, program ini memberikan alasan yang lebih jelas untuk stabilitas kebijakan dan komitmen pemerintah daerah.

Secara teknis, program ini mengadopsi pendekatan dari beberapa aliran pemikiran. Pendekatan PDIA (*Problem Driven Iterative Adaptation*) merupakan basis utama dalam program ini, ditambah dengan aliran pemikiran lain seperti *Deliverology*, dan pengalaman dalam mengimplementasikan program sebelum MELAYANI, Pendekatan *Rapid assesment and Action Plan*. Diagram di bawah ini menunjukkan siklus yang diikuti pemerintah daerah serta bagaimana fasilitator MELAYANI mendukung mereka di sepanjang siklus tersebut.

Bagaimana agar membantu pemerintah daerah?

Pengalaman MELAYANI menunjukkan bahwa pemerintah daerah memang memiliki

kapasitas untuk mengidentifikasi dan menanggapi masalah pemberian layanan dasar. Dengan berfokus pada masalah yang harus dipecahkan (ketimbang mengkaji program atau kategori anggaran tertentu), kabupaten-kabupaten melakukan identifikasi dan berupaya untuk mengatasi tantangan/persoalan yang sering tidak terlihat karena ditutupi oleh mekanisme perencanaan dan penganggaran rutin, seperti hambatan administratif atau masalah manajemen. Masalah-masalah tersebut dapat secara signifikan mengganggu kinerja. Walaupun tidak memakan banyak biaya, namun untuk menanganinya membutuhkan perubahan kemauan politik (*political will*) dari pemerintah atau pengambil kebijakan.

Meskipun begitu, kemauan politik tidak mesti disamakan dengan kepemimpinan semata. Dalam beberapa kasus, perubahan kecil dalam hal kemauan atau pendekatan birokrat kunci sama pentingnya (bahkan lebih) untuk mengubah tata cara implementasi yang tidak efektif atau mengatasi berbagai tantangan koordinasi.

Perubahan-perubahan ini didorong paling efektif oleh bukti lokal yang dikumpulkan oleh



Foto: Dok. Program MELAYANI

aktor lokal (pemerintah) sendiri. Sebagai contoh, di Kabupaten Belu di NTT, seorang anggota yang tergabung dalam tim pemerintah daerah yang bekerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan mengkaji korelasi antara sertifikasi guru dan nilai ujian siswa. Awalnya tim percaya bahwa guru yang tidak bersertifikasi menyebabkan kinerja yang rendah, tetapi kurangnya korelasi antara kedua hal tersebut mendorong tim untuk menggali lebih dalam masalah di ruang kelas dan sekolah. Temuan mereka menunjukkan bahwa sekolah yang berkinerja lebih baik memberikan dukungan yang lebih baik kepada guru-guru melalui pengawasan dan umpan balik yang jelas oleh kepala sekolah, pertemuan rutin yang berfokus pada masalah kelas (bukan administrasi), dan menggunakan kelompok kerja (Pokja) tingkat sekolah di mana guru dapat saling mendukung satu sama lain. Mereka mengidentifikasi peluang lebih lanjut untuk dukungan melalui kelompok kerja lintas sekolah dan meningkatkan keterlibatan pengawas sekolah di tingkat kecamatan. Hal ini kemudian memengaruhi Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Belu, yang memiliki kendali atas sejumlah pelaksanaan keputusan, termasuk bagaimana membuat kelompok kerja berjalan dalam mendukung guru dan bagaimana pelatihan-pelatihan dilakukan.

Menyajikan gambaran pembelajaran positif yang dilakukan daerah penting untuk

Alur kerja program MELAYANI



membantu aktor pemerintah daerah percaya bahwa mereka dapat berbuat lebih baik. Contoh-contoh ini sangat penting untuk membangun dukungan untuk perubahan dengan membantu aparat pemerintah daerah melihat potensi perubahan yang terwujud.



Foto: Dok. Program MELAYANI

5 Melaksanakan Solusi – Inventarisasi

Tim menginventarisasi pengalaman:

- Apa hasil yang dicapai?
- Apa pelajaran yang dipetik?
- Apa tantangan yang dihadapi?
- Bagaimana kita mengatasi tantangan itu?

Pendamping akan:

Memimpin tim melalui inventarisasi terhadap apa saja yang telah mereka selesaikan:

- Apa hasil yang dicapai?
- Apa pelajaran yang dipetik?
- Apa tantangan yang dihadapi?
- Bagaimana kita menghadapi tantangan itu?

6 Melaksanakan Solusi – Mengkomunikasikan Quick Wins

Berdasarkan bukti dari hasil inventarisasi, mengkomunikasikan quick wins dan pelajaran untuk meningkatkan legitimasi dan wewenang serta memerlukan dukungan.

Pendamping akan:

Mendukung kelompok untuk mengkomunikasikan keberhasilan dan memerlukan dukungan untuk aksi lanjutan.

7 Pertanyaan Kunci

Apakah iterasi yang lalu telah menyelesaikan masalah?

7 b TIDAK

Manfaatkan wewenang yang diperluas, terapkan pelajaran untuk menyesuaikan pola pikir mengenai masalah dan potensi desain solusi, lalu ulangi lagi (iterasi).

7 a YA

Keluar dari proses dan pertimbangkan penyebarluasan atau tantangan dalam penentuan skala

Sumber: Disadur dari Andrews dkk (2015) Membangun kapasitas dengan memberikan hasil: Mempraktikkan prinsip-prinsip PDIA

Meskipun program ini menunjukkan bahwa perubahan di tingkat lokal (dan dimotori oleh daerah) adalah mungkin terjadi, pentingnya peran fasilitator tidak bisa dianggap remeh, begitu juga dengan jumlah dukungan yang mereka butuhkan.

Menemukan fasilitator yang memiliki kapasitas untuk membantu tim pemerintah daerah menemukan jalan yang seringkali melalui proses analisa yang sulit adalah sebuah tantangan tersendiri. Mentor dari Bank Dunia mendukung para fasilitator selama program ini berlangsung, dan meskipun kapasitas mereka turut mengalami peningkatan, program-program serupa di masa depan akan terus perlu mendukung pengembangan kapasitas fasilitator jika ingin diimplementasikan pada skala yang lebih besar.

Terakhir, penting untuk melihat perubahan agar dapat lebih jauh mendukung pertumbuhan lokal. Meskipun terlalu dini untuk melihat perubahan dalam nilai tes siswa sebagai hasil dari dukungan MELAYANI, aparatur pemerintah daerah, terutama staf dinas pendidikan, sekarang semakin menggunakan Pendekatan Penyelesaian Masalah. Berbekal pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang mereka hadapi, dan kesadaran bahwa tidak ada jawaban tunggal untuk keberhasilan, mereka melihat secara keseluruhan portofolio pelatihan, dukungan untuk kelompok kerja (Pokja), manajemen pengawas sekolah dan lebih banyak lagi cara-cara yang dapat mereka lanjutkan untuk ditingkatkan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari: <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/bekerja-sama-dengan-pemerintah-daerah-untuk-meningkatkan-penyediaan-layanan-dasar>

SALASSAE, KAMPUS KEHIDUPAN MAHASISWA PERTANIAN

Oleh
ISWAN AFANDI

Belajar bersama alam', begitu ungkapan Andi Gujong salah seorang mahasiswa yang telah melakukan praktik perlakuan nutrisi alami di sawah desa Salassae, kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Gujong bersama 7 teman sejurusannya di fakultas pertanian adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) yang melaksanakan Kuliah Kerja Praktik (KKP) di desa Salassae, bersama Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS). Kegiatan KKP ini berlangsung selama 40 hari sejak kedatangan mereka pada bulan Maret 2021 lalu.



Sebagai mahasiswa fakultas pertanian, pengetahuan terkait pertanian bukan hanya diperoleh di ruang kuliah formal, tetapi juga bersama petani. Seperti hari itu di lahan sawah milik Pak Abdul Wahid. Nampaknya beberapa hari lagi padi di sawah akan panen, mungkin sekitar seminggu lagi. Mereka sedang Ma'bunre (istilah lokal yang berarti menjaring hama) sekaligus memberi nutrisi herbal penghalau hama. Mereka mengaplikasikan nutrisi yang telah mereka buat bersama sebelumnya. Penting untuk mempraktikkan



Foto: Yusuf Ahmad/Vayasan BAKTI

langsung agar pengetahuan bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga diterapkan. Begitu ungkap Wahyu teman Gujong sesama mahasiswa KKP yang sedang menyemprotkan nutrisi herbal dari *sprayer*.

Daud pun tak mau kalah, alat *Pabbunre* dikipaskan agar hama yang menempel di buah padi bisa terjaring untuk dipindahkan dari tanaman padi. Hari semakin sore, matahari perlahan beranjak. Untuk pemberian nutrisi herbal dan *Ma'bunre* diputuskan untuk dilanjut esok hari.

Pengalaman hari itu sangat luar biasa, langka dan mungkin dalam waktu lama tak akan dirasakan kembali oleh 8 orang mahasiswa jurusan pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang KKP. Apalagi saat kembali ke kampus, yang ada hanya belajar dengan tumpukan teori tanpa praktik. Keiatan praktik pengaplikasian nutrisi di sawah dilanjutkan dengan diskusi bersama seluruh peserta KKP dan petani alami di Balai Komunitas KSPS.

Sejak tahun 2018, petani alami Salassae terbuka dan menerima kunjungan mahasiswa



yang hendak belajar langsung terkait pertanian alami. Sampai tahun ini sudah ada empat angkatan yang datang menimba ilmu. KKP biasanya berlangsung selama 40 hari. Selama 40 hari itu mahasiswa belajar teori dan praktik pertanian alami dari para pakarnya langsung yakni bapak ibu petani alami Salassae.

Materi yang dipelajari selama di Salassae adalah teori pertanian alami dan filosofinya, serta praktik langsung dari teori yang telah dijelaskan. Bapak Abdul Wahid salah satu pentolan KSPS bertindak sebagai pengajar untuk materi ini. Mahasiswa mempelajari proses

tumbuh kembang tanaman, nutrisi apa saja yang dibutuhkan di tiap tahapan pertumbuhan dan bagaimana mengatasi hama yang menyerang juga dengan perlakuan alami. Kegiatan praktik biasanya berupa pembuatan nutrisi dengan bahan-bahan alami dari sekitar serta pengaplikasiannya pada tanaman di sawah dan kebun-kebun.

Selain teori dan praktik pertanian alami, mahasiswa KKP juga memperoleh pengetahuan tentang materi pengolahan pascapanen dan pemasaran produk pertanian alami. Untuk materi ini diberikan oleh bapak Muhammad Nur, Ketua KSPS.

Selain mahasiswa S1 dari UNISMUH, Salassae juga memberi ruang dengan menularkan ilmu pertanian alami kepada salah satu mahasiswa S2 Universitas Muslim Makassar jurusan pertanian.

Namanya Muhaimin Arsenio, oleh Komunitas Salassae, ia diberi lokasi khusus untuk menanam padi dengan sistem pertanian alami. Setiap hari ia ke sawah, ia bekerja layaknya seorang petani, menanam, membersihkan, menabur kompos, memberi





Foto-foto: Iswan Afandi

nutrisi. Bedanya, setiap hari ia memotret lokasinya, mengukur tinggi tanaman dan memeriksa apakah ada hama atau penyakit. Petani di sini akhirnya belajar juga padanya. Setiap kali ia menemukan hambatan dalam praktiknya, ia tidak ragu menemui dan menanyakannya kepada petani Salassae. Selama masa penelitian di Salassae, ia berinteraksi, saling belajar dan bertukar pengetahuan dengan petani alami di Salassae.

Boleh jadi, pendidikan petani-petani Salassae tidak setinggi mahasiswa-mahasiswa yang datang belajar, namun mereka

membuktikan bahwa dengan ilmu dan pengetahuan pertanian alami, mereka bisa berbagi peran pengajaran selayaknya dosen-dosen di bangku kuliah.

Belajar bertani dengan mengandalkan alam seperti yang dilakoni Petani Alami di Salassae penting ditularkan kepada anak muda, mahasiswa dengan harapan kelak bisa diaplikasikan atau diteruskan ilmunya ke petani lain.


“Salah satu tugas para Petani Alami di Salassae, selain mampu berpraktik di lahan pertanian, juga diberi tanggung jawab lebih yaitu mengajarkan pengetahuan pertanian alami kepada petani lain. Agar tujuan tentang kedaulatan atas petani bisa dirasakan oleh petani kita” tutur Pak Wahid di sela diskusi malam bersama mahasiswa Unismuh di Balai KSPS.

Kita doakan, kelak mereka (para mahasiswa) bisa menjadi bagian dari perjuangan Petani Alami. Cita-cita kedaulatan rasanya tak lama lagi, karena mereka sebagai "Mahasiswa" telah berada di barisan bersama Petani Alami.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi di: salassaiwan88@gmail.com





Badai Siklon NTT, dan Sebuah Upaya Respons Inklusif dari Organisasi Difabel

Oleh
NUR SYARIF RAMADHAN

Pada Minggu 4 April 2021, warga Nusa Tenggara Timur berduka akibat dampak yang ditimbulkan dari lewatnya Siklon Tropis Seroja. Hingga Selasa, 6 April, sebanyak 8.424 warga mengungsi, sementara 2.683 lainnya terkena dampak dalam berbagai bentuk. Pihak berwenang telah menanggapi laporan tanah

longsor, banjir yang meluas, angin kencang, dan jumlah korban jiwa.

Kota dan 11 kabupaten administratif yang saat ini terkena dampak banjir antara lain Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Malaka, Lembata, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, Rote Ndao, Alor, Sabu Raijua, dan Timor Tengah Selatan. Sebagaimana dilansir oleh NC4, sebuah badan pelaporan krisis global independen, di seluruh Nusa Tenggara Timur, setidaknya 84 kematian telah dilaporkan meskipun rincian spesifik belum dirilis. Angka sebelumnya menunjukkan sebanyak 49 orang



Foto udara kondisi permukiman Desa Nelelamadike pascabencana tanah longsor di Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, NTT.

Foto: **ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra**

dan di Kabupaten Rote Ndao 672 warga. Sebanyak 256 warga mengungsi di Kabupaten Flores Timur. Jumlah orang hilang dilaporkan 72; dengan 28 orang dari Kabupaten Alor, 23 orang dari Kabupaten Flores Timur, dan 21 orang dari Lembata.

Kerusakan struktural yang signifikan telah dilaporkan. Setidaknya 1.962 unit rumah terkena dampak dimana 119 di antaranya rusak parah. Sebanyak 118 unit rumah mengalami kerusakan sedang, sedangkan 34 rusak ringan. Empat belas fasilitas umum rusak berat, satu rusak ringan, dan 84 unit lainnya juga terkena dampak.

Di Kota Kupang, sepuluh unit fasilitas kesehatan dilaporkan rusak. Sementara di Kabupaten Flores Timur, 82 rumah rusak berat, 34 rusak ringan. Sedikitnya 97 unit rumah terkena dampak, sementara delapan unit fasilitas umum rusak berat. Di Kabupaten Malaka, 1.154 unit rumah terdampak dan 65 fasilitas umum terdampak. Sedangkan untuk Kabupaten Ngada terdapat 4 unit rumah rusak berat, dan 2 unit rumah sakit terkena dampak, dengan satu fasilitas umum terdampak.

Untuk Rote Ndao, 12 unit rumah mengalami kerusakan parah. Terakhir, di Kabupaten Alor sedikitnya 21 unit rumah rusak berat, enam fasilitas umum juga rusak berat, dan satu fasilitas umum rusak ringan. Sebanyak 11 fasilitas umum juga terpengaruh, sementara 106 rumah sakit terkena dampak.

Di Kabupaten Sumba Barat, 54 unit rumah terdampak. Sedangkan untuk Kabupaten Sumba Timur, tujuh fasilitas umum terdampak. Di Kota Waingapu, sekitar 7.200 warga dari tujuh kecamatan dievakuasi ke tujuh titik hasil kerja sama antara gereja setempat dan pemerintah daerah.

Beberapa media melaporkan bahwa jembatan utama di Kota Waingapu telah rusak akibat air dan tanah longsor. Begitu pula dengan Bendungan Lambanapu yang jebol yang menyebabkan sejumlah kecamatan

tewas di Kabupaten Flores Timur dan 67 orang tewas di Kabupaten Lembata. Di Kabupaten Alor sebanyak 12 orang tewas akibat banjir.

Kabupaten Sumba Timur mengalami jumlah pengungsi tertinggi total 7.212 warga. Sementara daerah yang paling terkena dampak di kabupaten ini termasuk Kecamatan Kampera, Pandawai, Wulla Waijillu, dan Karera. Sementara itu di Kabupaten Sumba Barat 284 jiwa terdampak.

Wilayah lainnya yang mengalami dampak cukup besar adalah Kabupaten Lembata dimana terdapat 958 warga yang mengungsi



tergenang air. Sejumlah rumah tersapu banjir yang datang menyusul jebolnya bendungan. Belum ada laporan cedera terkait dengan insiden khusus ini. Karena ini adalah situasi yang dinamis, pihak berwenang terus memantau perkembangan terkait kerusakan, korban jiwa, dan dampak terkait lainnya.

Difabel Dalam Bencana NTT

Sejumlah organisasi difabel yang berhasil dihubungi di NTT mengungkap kondisi difabel di sebelas kabupaten dan kota yang terdampak bencana. Berti Soli Dima Malingara dari Garamin NTT menyampaikan, sejumlah rumah difabel anggota Garamin mengalami kerusakan. Mereka yang rumahnya rusak parah dievakuasi terlebih dahulu ke rumah tetangga. Saat ini Berti bersama sejumlah jaringan organisasi difabel sedang mengupayakan respons inklusif untuk menjangkau lebih banyak difabel yang terdampak.

Fina, Ketua perkumpulan Tuna Daksa NTT (PERSANI) menyampaikan bahwa semua

teman difabel yang dikenalnya di Kota Kupang berada dalam kondisi selamat walaupun rumah dan fasilitas umum di sana banyak yang hancur. Mayoritas pengurus dan anggota PERSANI yang rumahnya rusak parah ditampung di gereja.

Informasi lain dari jaringan Tim Relawan Kemanusiaan Inklusi (TRK Inklusi) menyebutkan ada 40 penyandang disabilitas di Desa Kiufatu, Desa Toineke dan Desa Tuafanu Kecamatan Kualin Kabupaten Timur Tengah Selatan yang terdampak banjir, tergenang air. Relawan TRK Inklusi menyampaikan jika mereka terkendala Listrik dan jaringan telepon selular untuk melakukan pendataan dan pelaporan menggunakan format *online* yang telah disiapkan oleh TRK Inklusi.

Di Sumba Timur, Kecamatan Kampera, terdapat 199 orang penyandang disabilitas yang terdampak. Kondisi terkini mereka belum dapat dijangkau karena lokasi pengungsian yang terpencar dan tidak berfungsinya jaringan internet dan listrik di Kota Waingapu.

(Kiri) Seorang perempuan penyandang disabilitas yang terdampak bencana siklon di NTT. (Tengah-Kanan) Gambar kondisi rumah dan tempat usaha difabel pasca badai siklon.
Foto: **Dok. Jaringan Organisasi Difabel NT**

Ishak Salim dari PerDIK mengungkapkan bahwa dalam merespons rentetan bencana yang terjadi di NTT, TRK Inklusi untuk Nusa Tenggara Timur, mengajak masyarakat publik berdonasi guna meringankan beban korban bencana di Nusa Tenggara Timur, terutama difabel.

“Pada respons awal ini, kami bersama organisasi disabilitas NTT seperti Garamin NTT, FORSADIK, YAYASAN BAHTERA, dan KIPDA TTS bekerja sama untuk memulai upaya membantu korban,” jelas Ishak.

Ishak berharap agar semua pihak yang punya jaringan luas agar membantu menyebarkan informasi terkait donasi dari TRK Inklusi ini, dan mengajak teman-teman berkontribusi.

“Ini bukan hanya berdonasi materi tapi kami merencanakan untuk melakukan berbagai respons fisik lainnya yang nanti akan disesuaikan dengan kemampuan,” singkat Ishak.

Ishak juga menceritakan soal pengalaman TRK Inklusi saat merespons gempa bumi di Sulawesi Barat kemarin, TRK Inklusi dan organisasi disabilitas di sana mendapatkan dukungan luas bukan hanya donasi finansial, tapi juga dukungan dari berbagai pihak untuk pengembangan sumber daya, keterampilan mengelola bencana secara inklusif, pendataan dan analisis, kemampuan terapi fisik, dan beragam pengembangan kapasitas untuk internal organisasi. Beberapa organisasi yang turut mendukung adalah Yayasan PerDIK, LBH disabilitas Jatim, SIGAB Indonesia, YEU, ABS, CBM, dan beberapa organisasi disabilitas lainnya di berbagai kabupaten.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Manager Produksi Pengetahuan, Informasi dan Komunikasi Yayasan PerDIK

Artikel juga dapat dibaca di <https://ekspedisidifabel.wordpress.com/2021/04/08/badai-siklon-ntt-dan-sebuah-upaya-respon-inklusif-dari-organisasi-difabel/>



Di Kabupaten Malaka, relawan TRK Inklusi melaporkan di setiap posko terdapat setidaknya 20 orang difabel yang ikut mengungsi. Sayang sekali, di posko-posko tersebut, fasilitas toiletnya sulit diakses oleh teman-teman difabel sehingga mereka merasa kurang nyaman selama berada di pengungsian. Upaya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten sedang diupayakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Respons Inklusif dari Jaringan Organisasi Difabel

Merespons badai Siklon yang terjadi di NTT, TRK Inklusi, sebuah jaringan yang beranggotakan sejumlah organisasi yang *concern* pada kelompok difabel telah menyiapkan sejumlah rencana. Tim yang diorganisir oleh Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan ini berkoordinasi dengan beberapa jaringan organisasi difabel di NTT dan membuat sebuah grup WhatsApp khusus merespons bencana di NTT.



MENJAGA TRADISI TANAM PADI LOKAL ORANG TOBARU

Oleh **MAHMUD ICHI**

M

enanam padi beragam jenis lokal merupakan tradisi Orang Tobaru di Halmahera Barat, Maluku Utara. Benih padi warga Tobaru ini dikembangkan turun-temurun. Ada beberapa jenis padi lokal warga Tobaru sudah jarang ditemukan karena jarang ditanam. Komunitas ini mendiami sebagian besar Halmahera Barat, beberapa desa di Halmahera Utara dan Halmahera Selatan.

Kehidupan mereka, tak bisa terpisahkan dari hutan dan berkebun. Begitu penting kebun dan hutan itu bagi orang Tobaru bisa terlihat dari pegangan hidup mereka dalam bahasa lokal. *“Obongana gena mia wawango ma ugulu ka gengino o orasa nena si ado-ado nika o ngoka deo dononguku.”* Ini berarti hutan itu sumber hidup kami dari dulu, sekarang hingga anak cucu.”



Gabah dari padi lokal hasil panen Orang Tobaru.

Foto: **M. Ichi/ Mongabay Indonesia**

Jarum jam menunjukkan pukul 7.25 saat ibu Rin Bodi dan Lius Popo, suaminya, sudah meninggalkan rumah menuju kebun dan dusun kelapa berjarak sekitar tiga kilometer dari Desa Podol, Kecamatan Tabaru, Halmahera Barat, Maluku Utara.

Podol, merupakan satu dari 16 desa di Tabaru yang didiami masyarakat Adat Tobaru atau Orang Tabaru.

Komunitas Adat Tobaru, merupakan suku asli Halmahera yang mendiami sebagian besar Halmahera Barat, beberapa desa di Halmahera Utara dan Halmahera Selatan. Kehidupan mereka tergantung pada hutan dalam berkebun tanaman pangan dan perkebunan.

Rin dan Lius berangkat pagi hari untuk mengumpulkan buah pala matang yang jatuh. Kebun mereka juga tak jauh dari dusun kelapa.

Lahan pertanian atau kebun seluas seperempat hektar itu ditanami padi ladang yang mulai berisi, biasa mereka sebut padi bunting, dengan usia sekitar lima bulan. April mereka mulai masuki masa panen.

Rin bawa *saloi* (alat angkut barang) saat ke kebun, parang dan air putih. “Pagi-pagi, kami sudah harus ke kebun karena selain khawatir binatang yang merusak tanaman juga harus bekerja sejak pagi agar sebelum terasa panas di siang hari kerja sudah bisa selesai,” katanya.

Dia menanam padi benih lokal yang ditanam turun temurun masyarakat Tobaru. Di kebun itu selain padi juga ada pisang dan jahe.

“Padi ini ada nama lokal tapi orang di sini biasa sebut padi alus,” katanya. Mereka tanam padi tiga kulak. Ukuran satu kulak sekitar delapan cupak atau kaleng susu.

Padi yang mulai berisi kalau diamati ternyata terlihat ada banyak jenis. “Ada juga padi pulut hitam dan merah bercampur,” katanya.

Lius mengurus panen kelapa dan pala. Di sebelah lahan padi, masih ada kawasan berhutan yang belum jadi kebun. Nanti, lahan yang ditanami padi itu akan berganti pisang, serta tanaman tahunan seperti pala maupun kelapa. Setelah itu dibiarkan jadi hutan sekunder.

Praktik ini juga dilakukan sebagian besar suku-suku asli di Halmahera dan Maluku Utara. Mereka menyebut jorame. Jorame ini akan dibuka lagi 10-15 tahun berikutnya untuk jadi kebun dan ditanami padi atau tanaman pangan lain. Mereka percaya, praktik ini untuk mengembalikan kesuburan tanah.

Masyarakat Tobaru mempercayai alam punya kekuatan. Karena itu, dalam membuka lahan baru, dengan prosesi dan ritual. Mereka juga punya tradisi turun temurun ketika membuka kebun yakni gotong royong, biasa disebut *wange mia makakaesa* atau saling membantu membuat kebun.

Kalau dulu, orang makan nasi tidak setiap hari seperti sekarang. Dulu, orang mengandalkan pangan lain seperti pisang, sagu dan umbi-umbian dan lain-lain. Bahkan, dulu makanan berat atau sumber karbohidrat utama itu pisang dan popeda atau sagu ditutup dengan nasi. Sekarang, praktik ini terbalik. Nasi sebagai makanan utama dan pangan lain hanya tambahan.



1

Kehidupan mereka, kata Rin, tak bisa terpisahkan dari hutan dan berkebun. Begitu penting kebun dan hutan itu bagi orang Tobaru yang dengan teguh meyakini hutan itu sumber hidup kami dari dulu, sekarang hingga anak cucu.

Tradisi turun temurun

Dua karung gabah terenggok di dapur Yosep Ugu. Gabah kering itu rencana dia olah dengan mesin penggilingan padi. Gabah padi telah lama dikeringkan tersimpan dalam karung dan baru dibawa ke kampung sehari sebelumnya.

“Di dalam gabah padi ini ada banyak jenis tercampur. Gabah ini sisa panen tahun lalu dan sampai sekarang belum habis dikonsumsi. Tahun ini saya sempat menanam sedikit saja. Tidak banyak sekira tiga kulak atau seperempat hektar,” kata Yosep, warga Desa Togoreba Sungai, Kecamatan Tabaru.

Sisa padi musim tanam 2020 itu, katanya, sebagian masih di lumbung di rumah kebun. Padi-padi itu aman tersimpan meski panen sudah agak lama. Di lumbung padi hasil panen bisa disimpan hingga satu tahun.

“Saya tetap menanam padi setiap tahun karena tidak suka makan nasi beras dari toko

atau yang didatangkan dari luar. Karena itu harus selalu menanam padi untuk bisa memenuhi kebutuhan.”

Yosep, satu dari sekian warga Tabaru yang tetap mempertahankan tradisi menanam padi dan mengonsumsi beras dari lokal. Beras dari padi lokal warga Tobaru dan masyarakat Maluku Utara kenal dengan istilah bira sung atau beras baru.

Padi sesungguhnya adalah tanaman pembuka ketika seseorang membuka lahan hutan atau kebun baru. Sebagaimana tradisi warga Halmahera, kalau ada kebun dibuka dari hutan primer atau hutan sekunder, padi jadi tanaman pertama sebelum tanaman pangan lain. Orang Tobaru menyebut istilah membuka kebun padi.

“Dalam tradisi menanam padi juga sudah diatur waktunya, Oktober November, Desember. Saat menanam, benih diisi dalam satu ruas bambu. Tempat itu oleh orang Tobaru dikenal dengan nama otiba. Otiba ini biasan dipegang perempuan,” kata Yosias Palangi, tokoh adat Tobaru.

Dia bilang, luas kebun satu hektar biasa mereka tanam padi sekitar delapan kula, satu kula 15 cupak atau bekas kaleng susu. Orang yang melubangi tanah disebut yotuduku, alatnya disebut otu-tuduku.



- 1 Martha, perempuan Tobaru sedang membersihkan kebun.
- 2 Pisang Goroho, jenis pisang yang banyak ditanam petani Tobaru di kebun mereka. Kebun ini juga buat tanam padi ladang.
- 3 Menanam padi ladang sebagai tradisi masyarakat Tobaru.

Foto: **M. Ichi/ Mongabay Indonesia**

Tawas Tuluino, Kepala Adat Tobaru dari Desa Togoreba Tua bilang, tradisi tanam padi ini berlangsung setiap tahun. Tidak terkecuali dalam kondisi apapun petani Tobaru tetap menanam.

“Tidak semua orang menanam padi tiap tahun, tetapi karena sudah tradisi, setiap musim tanam pasti ada petani yang menanam. Ini sudah turun temurun gunakan bibit asli Tobaru.”

Dia bilang, banyak jenis padi lokal masyarakat Tobaru. Saat ini, yang banyak ditanam ada jenis pulo lenso, gamtala, pangalo, bidoi, padi aluss, bugis atau kayeli.

Mereka tanam padi juga tak di lahan luas, paling banyak satu hektar. Luasan itu, katanya, sudah cukup memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terpenting, setiap tahun menanam secara berkelanjutan. Meski hanya sekali, hasil bisa sampai setahun berikutnya.

Benih padi warga Tobaru ini dikembangkan turun-temurun. Ada beberapa jenis padi lokal warga Tobaru sudah jarang ditemukan karena jarang ditanam.

Setiap panen, warga tetap menyisakan benih untuk tanam musim berikutnya. Mereka simpan benih dalam lumbung padi. Kalau gagal panen, mereka tetap mencari atau membeli benih di kampung atau tetangga kampung.

Tawas mengatakan, banyak jenis padi lokal yang warga juga sudah tidak tahu namanya. Beras pulut saja, katanya, ada banyak jenis dari hitam, putih dan merah. Belum lagi jenis lain. Ada puluhan jenis yang sudah berpuluh tahun tidak lagi mereka tanam.

Herman Ime, petani dari Desa Togoreba Tua mengatakan, bibit yang mereka tanam itu tidak dibeli. Biasa dia tanam jenis padi bidoi dan kayeli. Jenis yang hilang, antara lain, kapuraca, misiri, suuru, atau pulo tibobo.

Warga Desa Togoreba Tua, dengan 180 keluarga tetap berkebun dengan menanam padi

Para perempuan biasa yang menaruh bibit atau menghambur bibit ke dalam lubang, yang disebut dengan yonoa. Setelah proses yonoa selesai, tahapan terakhir yodidumu atau menutupi lubang dengan alat disebut o-didimu. Untuk satu hektar perlu tiga empat orang bekerja menutup lubang pakai o-didimu.

Setelah aktivitas ini, proses menanam selesai. Tidak ada lagi aktivitas mengolah kebun atau menebang pohon di hutan dekat kebun yang baru ditanami padi. Kepercayaan mereka, kalau ada pembukaan kebun atau tebang hutan akan mengundang hama tikus datang dan memakan benih yang baru tanam. Tradisi ini, katanya, masih hidup dan dipakai sampai sekarang dalam proses menanam.

“Ketika menanam juga waktunya harus bersamaan karena berpengaruh pada serangan hama atau penyakit. Jika, sampai padi terserang hama atau penyakit para petani tidak pakai pestisida memberantasnya.”

Kebanyakan mereka memberantas hama atau penyakit padi pakai daun dan kulit kayu yang berbau tajam. “Kalau ada daun berbau tajam ditaruh di dekat kebun banyak hama datang mendekat dan akhirnya mati sendiri.”

walau mereka sudah kerja seperti pegawai negeri dan lain-lain. Menanam padi mereka tumpang-sari dengan jenis tanaman lain. Ada pisang, jagung hingga kacang-kacangan.

Petani Tobaru tidak pakai pupuk atau pestisida ketika menanam walau pemerintah sering memberikan pupuk kimia dan pestisida tetapi tidak mereka pakai. Pupuk dan pestisida itu diberikan begitu saja tanpa penjelasan atau pendampingan.

“Bantuan pupuk juga saya terima beberapa karung tapi tidak digunakan. Akhirnya rusak percuma,” kata Herman.

Sebagian warga desa menganggap beras yang mereka produksi melalui pengawetan atau ada bahan kimia banyak racun “Bayangkan saja mulai dari benih sudah ditaruh zat kimia sampai panen diolah lalu diisi dalam karung juga masih tetap menggunakan zat kimia,” kata Yosep.

Bagaimana upaya pemerintah daerah mendukung tradisi menanam padi ladang masyarakat Tobaru atau di Halmahera Barat? Totari Balatjai, Kepala Dinas Pertanian Halmahera Barat mengatakan, mereka punya program bantuan benih lokal setiap tahun kepada petani.

Ada beberapa varietas lokal sudah disertifikasi yang dibagikan kepada petani seperti kayeli, pako atau bidoi. Padi ladang petani di Halmahera Barat ini, katanya, total seluas 250 hektar.

“Masa pandemi ini petani yang mengusahakan padi ladang naik hampir 100 persen.”

Dalam catatan Dinas Pertanian Halbar, ada lebih dari 500 hektar padi ladang petani di Halmahera Barat termasuk masyarakat Tobaru.

Hasil inventarisasi keragaman sumber daya genetik tanaman pangan Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan di Maluku Utara oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) menunjukkan, keragaman sumberdaya genetik tinggi khusus padi gogo atau padi ladang.

Di Halmahera Barat, ada 15 aksesori padi gogo. Seluruh sumber daya genetik padi gogo termasuk golongan cere berumur empat sampai enam bulan, jenis aromatik, dan nasi pera. Umumnya, padi lokal tanam setahun sekali, dengan awal

tanam pada November dan Desember. Tinggi tanaman rata-rata dua meter hingga waktu panen, padi direbahkan dahulu untuk memudahkan panen dengan ani-ani. Warna beras beragam, ada putih, hitam, dan merah.

Gotongroyong

Masyarakat Tobaru mempercayai alam punya kekuatan. Karena itu, dalam membuka lahan baru, dengan prosesi dan ritual. Mereka juga punya tradisi turun temurun ketika membuka kebun yakni gotong royong, biasa disebut *wange mia makakaesa* atau saling membantu membuat kebun.

Wange mia makakaesa ini berlangsung sejak membuka lahan, menanam hingga panen. Semua mereka lakukan bergotong royong biasa antar warga sekampung atau lingkaran keluarga.

“Tradisi ini masih hidup hingga kini,” kata Tawas.

Gotong royong ini, katanya, tak hanya saat membuka kebun, menanam hingga panen juga kerja-kerja lain, seperti panen kelapa dan lain lain.

Dia bilang, kini mulai ada pergeseran karena sebagian mulai berbayar tetapi saling membantu ini masih tetap hidup di tengah masyarakat.

Orang Tobaru juga menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Slogan “*nou po maka dora*” berarti, “kita semua saling menyayangi dan membantu” melekat erat dalam keseharian.

Dalam tradisi membuka kebun baru, katanya, Orang Tobaru punya tahapan, pertama mulai dengan *sodoaka* atau potong tali dan kayu kecil-kecil atau *o sodoaka*. Setelah *sodoaka* lalu membersihkan rumput. Kalau sudah selesai lanjut dengan penebangan pohon.

Kayu-kayu kecil dipotong potong setelah melewati tahapan penebangan menunggu musim panas baru dibakar.

Dalam membakar lahan selalu ada batas agar api tidak merambat keluar. “Arah membakar mengikuti arah angin dan dibakar dari pinggiran.”

Setelah melewati tahap bakar, katanya, kalau semua batang terbakar, proses selesai. Kalau tidak, maka batang-batang tersisa atau disebut *yokaagomo*, diangkat dan bakar ulang.

Setelah melewati tahap ini, lalu mereka sapu bersih gunakan salara atau sapu lidi dari daun enau. Kalau sudah bersih proses menanam padi. Biasanya, untuk kebun baru buka dari hutan itu tanaman utama adalah padi.

Syafrudin Abdurahman, Ketua Program Studi Antropologi Univeristas Khairun Ternate mengatakan, menanam padi itu tradisi penting masyarakat Tobaru. Bahkan, dalam tradisi menanam padi orang di Maluku Utara ada kesamaan. Hanya saja, di di Halmahera Barat, terutama Kecamatan Sahu dan Ibu, ada upacara dalam khusus memperlakukan padi.

Kemiripan itu, katanya, juga ada pada tradisi masyarakat Tobaru, atau Tobelo Galela atau di Halmahera. Jadi, hanya beda penyebutan.

Dia contohkan, tradisi Tolagumi jadi tradisi umum di Maluku Utara, terlebih mereka yang membuka kebun baru.

Tradisi-tradisi lama yang hidup di tengah masyarakat petani ini, katanya, ketika masuk agama mulai hilang.

“Saya contohkan Orang Tobelo Dalam, tradisi gomateru itu sudah perlahan-lahan mati karena masuk agama kepada mereka,” kata Syafrudin.

Dalam tradisi syukuran di kampung-kampung termasuk di Tobaru, sebenarnya dulu bagian dari tradisi yang dipersembahkan kepada alam.

Ketika ada keyakinan baru masuk, mereka kemudian bentuk ucapan syukur yang dipersembahkan kepada alam itu beralih ke gereja, misal. Karena hasil panen yang didapatkan dari hasil kebun itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Dalam tradisi lama, mereka membuat ritual atau makan-makan yang dipersembahkan ke pohon-pohon atau tempat di alam yang dianggap punya kekuatan.

Hasil riset antropologinya, nenek moyang orang Tobaru hidup berpindah pindah atau nomaden seperti Suku Tobelo Dalam. Hanya yang membedakan adalah area atau daya jelajah. Masing-masing, tak keluar dari zona mereka.

Dalam praktik lama, ketika ada keluarga meninggal dunia mereka akan pindah meninggalkan tempat itu, termasuk ketika terserang wabah. Mereka percaya roh-roh orang

mati masih hidup jadi perlu meninggalkan lokasi atau wilayah yang ditempati.

Saat mereka pindah selalu di malam hari. Tujuannya, agar lalat sebagai sumber penyebar penyakit tak mengikuti saat pindah. Mereka yakin, lalat itu sumber penyebar penyakit. “Nenek moyang suku-suku asli ini sangat tahu lalat itu menjadi sumber penting dari penyebaran penyakit,” kata Abdurahman.

Warga Tobaru, katanya, masih mengkonsumsi beras dari luar tetapi dalam urusan menanam padi itu sudah tradisi. Tanaman padi, katanya, berhubungan dengan keselamatan memenuhi hajat hidup sehari-hari.

Masyarakat Tobaru, katanya, punya berbagai ritual untuk menyelamatkan sumber pangan mereka agar terhindar dari penyakit dan gagal panen.

Ketika mereka menanam dan berhasil, akan simpan benih untuk musim tanam berikutnya. Mereka juga mengalokasikan bagian untuk ritual dan pesta. Sisanya buat konsumsi.

Kalau dulu, orang makan nasi tidak setiap hari seperti sekarang. Dulu, orang mengandalkan pangan lain seperti pisang, sagu dan ubi-ubian dan lain-lain. Bahkan, katanya, dulu makanan berat atau sumber karbohidrat utama itu pisang dan popeda atau sagu ditutup dengan nasi. Sekarang, praktik ini terbalik. Nasi sebagai makanan utama dan pangan lain hanya tambahan.

Begitu juga urusan keyakinan di gereja ada syukuran padi baru panen. Ritual ini, katanya, yang memacu mereka tetap menanam padi tidak hanya untuk makan juga kebutuhan ritual panen padi atau bira sung.

Ada penganan nasi jaha kembar dibuat dengan beras baru atau padi ladang. Rata-rata persembahkan untuk syukuran. Penganan dari padi ladang ini tidak bisa dengan beras lain.

“Tradisi menanam padi itu sebenarnya berhubungan juga dengan ritual. Kalau dulu sebelum masuk agama mereka melakukan persembahkan ke alam. Sekarang, beralih dengan syukuran di tempat ibadah.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari: <https://www.mongabay.co.id/2021/05/02/menjaga-tradisi-tanam-padi-lokal-orang-tobaru/>

Gender *Pay Gap* dan Kebebasan Memilih

Oleh **SAMUELLA CHRISTY**



Kesenjangan penghasilan antar gender merupakan salah satu topik penting dalam masalah ketenagakerjaan. Richard Anker menjelaskan bahwa kesenjangan penghasilan antar gender terjadi di seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia.



Menurut temuan dari *Korn Ferry Gender Pay Index*, kesenjangan upah gender di Indonesia secara keseluruhan sebesar 5.3%, di mana perempuan dibayar 1.7% lebih rendah dengan posisi pekerjaan yang sama. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2017, perbedaan upah gender di Indonesia mencapai 690 ribu rupiah per bulan. Sama halnya dengan laporan *Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance 2017* menulis bahwa perempuan dibayar 70-80% dari yang didapatkan laki-laki per jam. Ini berarti setiap 1 juta rupiah yang dihasilkan laki-laki per jamnya, perempuan hanya memperoleh 700 hingga 800 ribu per jamnya.

Secara terminologis, *gender pay gap* atau kesenjangan upah gender dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara upah yang dibayarkan kepada laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, istilah ini mengacu kepada median upah tahunan seluruh perempuan yang bekerja penuh waktu sepanjang tahun, dibandingkan dengan upah laki-laki dengan metode yang sama. Beberapa faktor dari kenyataan kesenjangan tersebut adalah segregasi pekerjaan, bias terhadap pekerja perempuan, dan diskriminasi upah.

Banyak orang berpendapat bahwa, masalah rendahnya penghasilan perempuan daripada laki-laki di Indonesia, tidak terlepas dari budaya patriarki yang sering kali tidak menguntungkan bagi perempuan. Peran laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga membuat partisipasi perempuan di pasar kerja tidaklah sebesar partisipasi laki-laki. Walaupun bekerja, perempuan sering dibayar lebih murah dibandingkan laki-laki, meskipun memiliki kemampuan yang sama.

Sekelompok masyarakat beranggapan bahwa, *gender pay gap* merupakan masalah yang secepat mungkin harus dihilangkan karena merupakan wujud nyata dari diskriminasi

Memilih profesi merupakan keputusan pribadi individu (negative rights). Perempuan bisa saja memilih jurusan yang memiliki upah tinggi di dunia pekerjaan, tetapi banyak yang memutuskan untuk tidak memilih jurusan tersebut.

terhadap perempuan. Kelompok lain beranggapan bahwa *gender pay gap* terjadi dikarenakan faktor-faktor selain diskriminasi. Kesimpulan bahwa *gender pay gap* menunjukkan diskriminasi gender tidak dapat langsung diambil jika faktor-faktor lain seperti faktor biologis masih ada dan tidak dianggap tetap (kondisi *ceteris paribus*). Namun, apakah perbedaan faktor biologis atau faktor ilmiah lainnya dapat menjustifikasi ketidakadilan dalam hal pengupahan tenaga kerja?

Bicara mengenai penyebab, saya memecah penyebab dari diskriminasi gender yang berakibat pada *gender pay gap* menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pembagian 2 jenis hak, yaitu *positive freedom* dan *negative rights*. *Positive freedom* adalah segala hak untuk memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Sedangkan, *negative rights* adalah hak prerogatif di mana hak manusia tersebut tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Saya meyakini bahwa kesenjangan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan mengacu pada permasalahan dalam *negative rights*.

Setiap manusia, baik dalam gender apapun, memiliki hak untuk memilih pekerjaannya, dan tidak boleh ada pemaksaan dalam bentuk apapun. Dalam pandangan saya, isu *gender pay gap* secara spesifik bukan merupakan isu ekonomi, melainkan sebuah isu sosial.

Selanjutnya, menanggapi regulasi pemerintah mengenai kewajiban peran perempuan dalam pemerintahan, terkait dengan *positive freedom* dan *negative rights*, pemberian pekerjaan seharusnya didasari kompetensi dan bukan pemaksaan kuota gender.

Regulasi ini merupakan tindakan pemerintah yang menggerus hak pilih individu dalam memilih pekerjaan. Hal yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah mendukung para perempuan yang memiliki kompetensi dan memberi akses pada siapapun (tidak semata terbatas karena gender) yang setara dalam dunia politik untuk tidak takut mencoba masuk ke dunia politik dan pemerintahan. Yang dilihat di sini seharusnya *value* seseorang sebagai individual, bukan *value* sebagai gender, ras, agama, dan lainnya.

Banyak variabel serta faktor pendukung lainnya yang menyebabkan perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, bukan semata-mata perihal perbedaan gender sehingga tidak sah untuk membuat sebuah *blanket statement* untuk semua kondisi.

Mari kita lihat ke ranah lapangan kerja yang juga mengikuti hukum *supply and demand*. Saya ambil contoh, model. Kalau memang murni perbedaan upah karena gender pay gap, kenapa penghasilan model perempuan rata-rata lebih tinggi dibanding model laki-laki? Hal ini dikarenakan *demand* untuk model laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Contoh lain di Georgetown University terdapat 10 jurusan dengan prospek gaji tinggi ketika bekerja, tetapi hanya 1 jurusan yang mahasiswanya mayoritas perempuan. (Carnevale, Smith, Gulish. 2018).

Hal ini menandakan bahwa memilih profesi merupakan keputusan pribadi individu (*negative rights*). Perempuan bisa saja memilih jurusan yang memiliki upah tinggi di dunia

pekerjaan, tetapi banyak yang memutuskan untuk tidak memilih jurusan tersebut.

Di satu sisi, secara inheren, perbedaan antara laki-laki dan perempuan akan selalu ada. Namun, hal itu tidak selalu berarti diskriminasi. Perbedaan sifat perempuan dan laki-laki yang sudah digeneralisir oleh masyarakat, seperti stigma gender perempuan memiliki sifat yang lebih lembut, cengeng, dan sensitif dibanding laki-laki. Sedangkan, stigma laki-laki dianggap memiliki peran natural sebagai pemimpin. Stigma perbedaan fungsi ini muncul karena perbedaan alat kelamin dan berimbas pada pemisahan profesi antara laki-laki dan perempuan.

Stigma-stigma tersebut kemudian mengakar pada masyarakat dan dianggap menjadi kodrat gender. Persepsi kodrat merupakan hasil dari proses internalisasi yang panjang, sehingga hampir seluruh masyarakat menganggap kodrat laki-laki adalah bekerja dan kodrat perempuan adalah diam di rumah tanpa mengetahui asal-usul kodrat tersebut, masyarakat ikut meyakinkannya. Proses internalisasi yang terjadi sejak waktu yang lama inilah yang juga mendasari norma gender.

Pada kenyataannya, sangat sulit untuk menghitung jumlah perempuan yang terkena efek patriarki (diskriminasi dan dirugikan akan hal tersebut), dengan perempuan yang memang memilih jalannya berdasarkan keputusannya sendiri. Memang, ada faktor pendukung juga dalam pengambilan keputusan individu, seperti stigma masyarakat. Namun, pada akhirnya, individu harus dapat memilih sesuai dengan keputusannya sendiri.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah siswi SMA yang aktif menulis di berbagai media mengenai isu-isu politik dan sosial. Dapat dihubungi di samuellachristy3005@gmail.com. Artikel juga dapat dibaca di <https://suarakebebasan.id/gender-pay-gap-dan-kebebasan-memilih/>



Hasriyanti (kiri) menggendong putrinya yang berusia 21 bulan, Zalfa, sambil mendengarkan penjelasan Biah tentang gejala dan cara mencegah COVID-19.. Foto: **Yayasan LemINA/2020/Fitriana Arsjad**

MEMUPUK ASA DI TENGAH PANDEMI

Oleh **ANDI ARIFAYANI**

Pada sebuah kawasan padat di Makassar, Sulawesi Selatan, Hasnah duduk di teras rumahnya. Ia mengamati tetangganya, Biah, yang sedang menjelaskan cara-cara mencegah penularan COVID-19 menggunakan kertas. Sebagai pemilik warung yang berinteraksi dengan pembeli setiap hari, Hasnah termasuk berisiko tinggi terkena COVID-19.

“Jangan lupa cuci tangan dengan sabun, ya!” Biah mengingatkan Hasnah, yang menganggukkan kepala tanda mengerti.



Berkeliling mengunjungi warga untuk menyosialisasikan isu kesehatan sudah sejak lama dilakukan oleh Biah, termasuk sebelum pandemi. Ia telah menjadi kader kesehatan di Makassar sejak tahun 1994 dan telah mengalami banyak suka dan duka.

Sebelum pandemi, Biah dan kader lain membantu kegiatan posyandu. Mereka mengukur tinggi dan menimbang berat anak-anak, membantu pemberian imunisasi, membagikan vitamin, dan mengingatkan jadwal kunjungan berikutnya kepada orang tua.

“Saya bertemu dan berkomunikasi dengan warga yang bermacam-macam pendapat dan sifatnya,” kata Biah saat menceritakan pengalamannya sebagai kader. “Sebagian dengan sukarela membawa anak ke posyandu, tetapi sebagian lain menolak meskipun saya sudah memohon-mohon. Mereka biasanya beralasan anak-anaknya sehat, jadi tidak ada alasan berkunjung ke posyandu.”

Pengalamannya selama ini mengajarkan Biah bahwa cara paling efektif untuk berkomunikasi dengan warga setempat adalah dengan membangun kedekatan. Pesan pun perlu disampaikan sesederhana mungkin.

Sejak pandemi, tanggung jawab kader kesehatan bertambah. Mereka kini ditugaskan untuk memastikan warga menerima informasi yang tepat terkait COVID-19 serta tahu cara-cara dan pencegahan penularan.

Untuk mendukung para kader, UNICEF Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah Sulawesi Selatan, mengadakan pelatihan yang diikuti 321 kader dari seluruh provinsi. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Yayasan LemINA pada Juli 2020.

Dari pelatihan ini, Biah belajar cara sosialisasi COVID-19 dan peran kader kesehatan dalam mencegah wabah. Ia juga diberikan informasi terbaru tentang COVID-19 untuk memastikan ia selalu memberikan kabar yang aktual dan akurat kepada warga setempat.



“Saya belajar apa itu COVID-19, gejalanya, cara penularan, cara melindungi diri, dan kebiasaan hidup bersih dan sehat,” jelasnya.

Usai menemui Hasnah, Biah melanjutkan perjalanannya menembus lingkungan padat. Di satu tangan, ia menenteng kotak berisi alat-alat kebersihan. Di tangan lain, ia membawa setumpuk kertas. Biah berbelok di muka sebuah gang sempit dan tiba di rumah Nia. Sama seperti Hasnah, Nia juga tergolong rentan karena kondisi jantungnya. Ia jarang meninggalkan rumah sejak wabah terjadi.

Biah menemui Nia untuk memberikannya perlengkapan kebersihan: alat disinfektan, tisu basah, sabun antiseptik, gunting kuku, pembalut, masker kain, jeriken yang bisa dilipat, dan poster edukasi. Kepada Nia, Biah menjelaskan cara menggunakan setiap benda agar rumahnya tetap bersih dan keluarganya aman.

“Kunjungan ke rumah adalah salah satu strategi utama yang digunakan kader kesehatan

(kiri) Biah menyerahkan perlengkapan kebersihan kepada seorang warga. (kanan) Biah menjelaskan gejala dan pencegahan wabah kepada tetangganya, Hasnah.

Foto: **Yayasan LemINA/2020/Fitriana Arsjad**

untuk menjangkau masyarakat selama pandemi,” ujar Wildan Setiabudi, *WASH Officer* UNICEF Indonesia. “Komitmen dan kerja keras para kader tidak ternilai harganya bagi upaya penanggulangan COVID-19.”

Setelah mengajarkan Nia cara mencuci tangan dengan sabun dan mendoakan Nia agar selalu sehat, Biah pun berpamitan. Masih ada keluarga lain yang perlu ia kunjungi dan Biah bertekad melanjutkan perjalanannya hari itu, berkeliling kota dan menjangkau semua orang.

UNICEF Indonesia menyampaikan terima kasih kepada para donor utama, termasuk Pemerintah Selandia Baru.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari

<https://www.unicef.org/indonesia/id/stories/mempuk-asa-di-tengah-pandemi>

Rencana Pembangunan Landasan Roket SpaceX Milik Elon Musk di Biak, Papua Ancam Lahan & Penghidupan Masyarakat Lokal

Oleh **SOPHIE CHAO**

Bulan Desember 2020, pemerintah Indonesia sempat diberitakan menawarkan Pulau Biak, provinsi Papua, sebagai landasan peluncuran roket ke planet Mars, kepada Elon Musk, seorang miliuner asal AS dan pendiri perusahaan SpaceX.

SpaceX adalah sebuah perusahaan antariksa dengan teknologi paling mutakhir yang dibangun oleh Elon Musk pada tahun 2002. Perusahaan ini bertujuan untuk membawa manusia terbang dan tinggal di Mars dan planet potensial lainnya, secara berkelanjutan dan dalam skala besar.

Dengan demikian, peradaban manusia bisa terus ada meski ada bencana besar melanda Bumi, seperti serangan asteroid atau perang nuklir, yang membuat kehidupan di planet ini menjadi sulit.

Pemerintah menyatakan bahwa proyek ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat Biak, sebuah pulau dengan minim infrastruktur. Perkembangan terbaru, media melaporkan pada 11 Maret, bahwa pemerintah Indonesia membantah telah menawarkan Biak kepada Elon Musk, meski ada laporan dari JUBI, *website* berita berbasis di Papua, Jayapura, yang



mengklaim bahwa proyek SpaceX masih berlanjut.

Belum ada kepastian dari pihak Elon Musk terkait tawaran ini, namun beberapa penduduk di Biak sudah menyatakan ketidaksetujuan mereka atas proyek tersebut. Mereka mengkhawatirkan dampak negatif terhadap lingkungan, budaya dan penghidupan mereka, serta berpotensi menggusur komunitas dari rumah dan desa asli mereka.

Faktor ekonomi dan lokasi strategis

Pulau Biak dianggap sebagai lokasi yang tepat bagi ekspedisi Mars karena alasan ekonomi dan strategis. Pulau ini dikenal kaya oleh tembaga dan nikel, bahan baku yang penting bagi produksi roket dan baterai untuk kendaraan listrik, misalnya Tesla (yang juga dimiliki oleh Elon Musk).

Selain itu, pulau Biak terletak sekitar satu derajat di selatan ekuator, lokasi yang cukup strategis karena ini artinya tidak perlu memakan bahan bakar lebih untuk mencapai orbit. Dari proyek ke Mars ini, proyeksi keuntungan yang akan didapatkan perusahaan SpaceX mencapai 36 miliar dolar (Rp514 triliun) pada tahun 2025. Namun, proyeksi keuntungan ini masih mengundang perdebatan.

Sebagai seorang antropolog sosial, saya telah menghabiskan bertahun-tahun meneliti

bagaimana masyarakat adat di Papua berinteraksi dengan lingkungan alami mereka. Secara khusus, saya telah mengeksplor bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi Papua membentuk bagaimana mereka berinteraksi dan mengerti tentang nilai dan arti dari alam yang mereka tinggali, seperti di hutan, lautan, sungai dan daratan.

Sepanjang Maret dan April 2021, saya telah mewawancarai 10 penduduk di Biak untuk memahami perspektif mereka tentang proyek SpaceX tersebut. Cukup banyak yang mengatakan bahwa mereka percaya mereka memiliki hak untuk menentukan pembangunan macam apa yang mereka inginkan di tanah mereka dan penghidupan seperti apa yang ingin mereka cari.

Salah satu tetua menjelaskan bahwa komunitas lokal di Biak sudah menjadi nelayan, pengumpul makanan, pemburu, menjalankan hortikultur dan beternak skala kecil dari generasi ke generasi.

Gagasan untuk bisa bertahan hidup di luar angkasa, apalagi Mars, merupakan konsep yang asing bagi mereka. Hal ini karena mereka sangat memercayai bahwa cara mereka mengolah hutan dan lautan sudah cukup berkelanjutan.

Lahan dan penghidupan

Proyek SpaceX juga mengancam lahan dan penghidupan dari penduduk Biak. Mereka terus menggantungkan hidup kepada perikanan, perburuan, dan hortikultur untuk sehari-hari.

Sama halnya dengan komunitas masyarakat adat Papua lainnya, tanah dan lingkungan mewakili bagian penting atas kekayaan budaya lokal mereka.

Beberapa masyarakat yang diwawancarai menjelaskan bahwa klan dan suku di Biak berbagi leluhur dengan tanaman, spesies dan lokasi di lanskap yang berbeda, yang juga menjadi tanggung jawab mereka untuk dijaga dan dilindungi. Sebagai contoh, ada kepercayaan bahwa buaya merepresentasikan kekuatan dari laut dan klan-klan di Biak menganggap ini adalah satwa suci.



Sumber foto: Official SpaceX Photos/Flickr.com

Untuk penduduk Biak dan Papua lainnya, lingkungan merupakan sumber pengetahuan tradisional yang berharga, di mana kisah-kisah dan sistem kepercayaan animisme diturunkan dari berbagai generasi. Mitos-mitos Biak terkadang menggambarkan tumbuhan hutan, seperti kelapa sawit, satwa, termasuk ular dan burung, dan fenomena alami seperti Bulan dan Matahari.

Bagi penduduk Biak, menghancurkan lingkungan berarti menghancurkan identitas budaya, kepemilikan, dan kebanggaan mereka.

Risiko lainnya adalah proyek Biak bisa menggeser populasi. Salah satu tetua Biak yang saya wawancarai menyatakan bahwa memindahkan suku ke wilayah lain akan menyebabkan masalah dengan suku-suku yang sudah berdiam dan memiliki lahan di daerah tersebut. Ini akan berpotensi terjadinya sengketa lahan, konflik sosial, dan meningkatnya kekerasan.

Trauma yang mendalam

Banyak penduduk Biak yang saya wawancarai juga berargumen bahwa proyek tersebut akan mengaburkan sejarah kekerasan dan penderitaan, dan mimpi untuk keadilan dan kebebasan bagi Papua Barat, terbenam oleh roket dan eksplorasi angkasa. Secara khusus, transformasi pulau mereka menjadi pangkalan luncur untuk pencarian antarplanet bisa berpotensi mengaburkan trauma yang masih mendalam dari para keluarga dan keturunan yang menjadi korban “Biak Mascare”, pada tahun 1998 silam.

Biak Massacre Citizens Tribunal, sebuah penyelidikan judicial dan keterangan para saksi ahli yang digelar di Universitas Sydney, pada Desember 2013, menemukan bahwa militer dan aparat keamanan Indonesia telah menyiksa, memperkosa, dan membuang ratusan penduduk sipil Biak di lautan.

Beberapa korban telah mencoba untuk menaikkan bendera Papua Barat, yang merupakan tindakan kriminal dan bisa terkena hukuman 15 tahun di penjara. Hingga saat ini, tidak ada tuntutan hukum yang dilyangkan bagi pelaku kekerasan tersebut.

Pemerintah juga menyangkal keterlibatan terhadap aksi tersebut, yang dianggap oleh organisasi pembela HAM sebagai salah satu pembantaian terburuk di Indonesia, sepanjang sejarah pasca Suharto. Trauma yang belum tersembuhkan memiliki bagian besar yang membentuk reaksi penduduk Biak terhadap proyek SpaceX tersebut.

Bagi kebanyakan penduduk, melihat ke masa depan menuntut pengakuan dari komunitas nasional dan internasional terhadap kekerasan yang menjadi karakter dari masa lalu Papua Barat dan penolakan terhadap kebebasan yang tetap menjadi ciri pada masa kini. Dari bertahun-tahun bekerja bersama dan belajar dari masyarakat adat Papua, saya memahami bahwa mereka pun memiliki mimpi sendiri, termasuk impian untuk keadilan, lingkungan yang sehat dan budaya yang berkelanjutan.

Masyarakat adat Papua merupakan salah satu penjaga dan pelindung terakhir dari kebudayaan adat yang kaya di Indonesia. Hal ini tumbuh dari relasi penghormatan dan perlindungan terhadap lahan dan lingkungan hidup. Masyarakat Papua memiliki harapan untuk masa depan anak dan cucu mereka, bukan di Mars atau bulan, tetapi ada di tanah adat mereka sendiri, di hutan dan lautan.

Masalah muncul ketika beberapa mimpi yang diprioritaskan dengan mengorbankan orang lain.

Eksplorasi antarplanet mungkin bisa memberikan janji masa depan yang revolusioner bagi manusia di kemudian hari. Tetapi, tidak seharusnya mengabaikan keberadaan dan keadilan bagi manusia saat ini.

Masa depan kemanusiaan akan bisa menjadi hebat apabila seluruh visi bisa menghormati, baik dari visi pengusaha dan pemerintah, keberadaan komunitas lokal dan lingkungan mereka yang kian rentan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Postdoctoral Research Associate in History, University of Sydney

Artikel bersumber dari *The Conversation Indonesia* dan dapat dibaca pada link berikut ini <https://theconversation.com/rencana-pembangunan-landasan-roket-spacex-milik-elon-musk-di-biak-papua-ancam-lahan-dan-penghidupan-masyarakat-lokal-160536>



DISKUSI ONLINE LIVE DI **Instagram Story @infobakti**



POSYANDU TEMPAT MENGADU

Jika selama ini, Posyandu lebih dikenal sebagai lembaga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat utamanya untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita yang rutin dilaksanakan di seluruh desa/kelurahan.

Di Kabupaten Maros, di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berinovasi memberikan layanan yang cepat dan menjangkau seluruh wilayah demi memastikan agar kehidupan perempuan dan anak terlindungi dan terpenuhi hak-haknya termasuk dilindungi dari KDRT.

Bagaimana inovasi ini dijalankan dan siapkah Posyandu sebagai tempat mengadu? Berikut diskusi kami bersama Pak Idrus (Kepala DP3A) Kabupaten Maros.



PENGELOLAAN BENTANG ALAM BERKELANJUTAN DI GORONTALO

Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari kawasan Wallacea. Di provinsi ini, ada satu kabupaten bernama Pohuwatu yang memiliki hutan alam relatif kompak dengan luas kawasan 88% dari total luas wilayah. Seluruh kawasan saling terhubung dalam satu bentang alam. Sebanyak 70% dari luas total hutan ini merupakan kawasan konservasi dan hutan lindung di Provinsi Gorontalo.

Sejak tahun 2009 Burung Indonesia bersama para pihak termasuk pemerintah daerah di Gorontalo mendorong model pengelolaan bentang alam yang berkelanjutan guna melestarikan keragaman hayati sekaligus meningkatkan penghidupan masyarakat di sekitar hutan dengan memperkuat konektivitas hutan alam Gorontalo.



MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DARI PEDALAMAN SULSEL

1000 Guru, komunitas beranggotakan pemuda-pemudi yang peduli pendidikan anak-anak di wilayah terpencil Indonesia. Komunitas 1000 Guru Sulsel merupakan regional pertama yang terbentuk di kawasan timur Indonesia dengan program utama "traveling and teaching" yang mengajak anak muda Indonesia dari berbagai latar belakang profesi untuk menjadi guru sehari di pedalaman, sembari menapaki keindahan alam di pedalaman negeri dan mengenal budaya adat-istiadat di sana tapi juga melakukan kegiatan mengajar serta berbagi ilmu dengan anak-anak di daerah terpencil.

Membangun Roh Program PROSPPEK

"Kami percaya data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau SAIK Plus ini akurat dan selalu diperbaharui karena dikelola oleh kader kampung setempat sehingga bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merencanakan program pembangunan," terang Markus Waran, Bupati Manokwari Selatan.

Keunggulan SAIK Plus yang dibangun KOMPAK bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Sorong, Fakfak, dan Kaimana sejak 2017 inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat mengadopsi SAIK Plus guna mendukung Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) di seluruh 13 kabupaten/kota mulai 2020.

PROSPPEK adalah program yang bertujuan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), melalui perbaikan kesehatan, pendidikan dan peningkatan ekonomi di tingkat kampung dengan memanfaatkan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) sebesar Rp225 juta/tahun untuk setiap kampung.

SAIK Plus sebagai platform digital untuk menyimpan dan memutakhirkan data sosial, kependudukan, dan ekonomi masyarakat yang dikelola kader kampung berperan menyediakan data akurat bagi pemerintah kampung supaya kegiatan perbaikan layanan dasar dan peningkatan ekonomi dapat tepat sasaran.

Sampai saat ini sebanyak 87 kampung di Provinsi Papua Barat telah mengembangkan dan memanfaatkan SAIK Plus yang dikelola oleh 92 kader kampung (70 laki-laki dan 22 perempuan) dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

<https://batukarinfo.com/komunitas/articles/membangun-roh-program-prosppek>

Referensi



Policy Brief:

Mengembalikan Kejayaan Sutra Sulawesi Selatan - Sektor Hilir

Sektor hilir industri sutra, pemasaran dan konsumsi, tampak lumayan sehat dengan relatif besarnya *captive market* produk sutra Sulawesi Selatan. Para konsumen masih mengoleksi dalam jumlah relatif besar, dan jumlah pengguna tersebut cukup banyak karena produk sutra melekat erat dalam ritual-ritual siklus hidup masyarakat Sulawesi Selatan, pada perayaan lebaran, serta ulang tahun kabupaten dan provinsi. Namun ada tiga persoalan yang dihadapi di sektor ini, yaitu: (i) susutnya permintaan sarung sutra asli, (ii) plagiasi motif, dan (iii) ketimpangan antarpelaku di sektor hilir.

Untuk mengatasi persoalan pertama dibutuhkan kampanye penggunaan dan perbaikan promosi produk (termasuk melibatkan *story telling*), juga perbaikan sistem labelisasi. Masalah plagiasi dapat dihadapi dengan perbaikan aturan dan mekanisme pengurusan hak paten. Sementara rekomendasi untuk persoalan ketimpangan telah diurai dalam *Policy Brief* Sektor Manufaktur.

<https://batukarinfo.com/referensi/policy-brief-mengembalikan-kejayaan-sulawesi-selatan-sektor-hilir>

Berita Terbaru

Kupang Terapkan Konsep Satu dalam Dua untuk Tekan COVID-19

Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk menekan kasus harian covid-19 yang cenderung meningkat. Perpanjangan PPKM Mikro berlangsung hingga 17 Mei 2021. Sampai Sabtu (8/5) siang, total kasus covid-19 di Kota Kupang mencapai 237 kasus atau hanya bertambah sebanyak 13 orang berasal dari pelaku perjalanan dibandingkan sehari sebelumnya 36 orang. Tambahan kasus baru tersebut berasal dari pemeriksaan 158 sampel swab. Wali Kota Kupang Jefri Riwi Kore mengatakan operasional pencegahan covid-19 dan pemantauan isolasi mandiri dilakukan di tingkat kelurahan serta RT dan RW menggunakan konsep satu dalam dua (*one in two*). "Ada dua hal yang menjadi substansi pelaksanaan konsep ini yakni operasional pencegahan covid dan pemantauan isolasi mandiri tingkat kelurahan.

Dua konsep ini lahir berdasarkan evaluasi pelaksanaan penanganan covid-19 di Kota Kupang selama ini," ujarnya. Dalam konsep tersebut, para lurah bertugas melibatkan unsur kelembagaan di tingkat masyarakat, melakukan pemantauan orang tanpa gejala (OTG) dan kontakannya dalam wilayah sesuai laporan, memastikan dan memantau pelaksanaan 5M di wilayahnya masing-masing, serta melakukan edukasi kepada warga mematuhi protokol kesehatan. "Warga yang tidak taat diberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis untuk menghindari kekerasan fisik," ujarnya.

<https://batukarinfo.com/news/kupang-terapkan-konsep-satu-dalam-dua-untuk-tekan-covid-19>